

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA DI DESA ASAM JAWA
KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN**

SKRIPSI

OLEH:

SAHRIL SAHPUTRA

NIM. 0501162080

**Program Studi
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA DI DESA ASAM JAWA
KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Akademik
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Islam**

SAHRIL SAHPUTRA

NIM 0501162080



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA DI DESA ASAM JAWA
KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN**

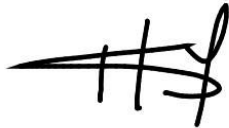
OLEH:

Sahril Sahputra
NIM.0501162080

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam
Medan, 11 Oktober 2021

Menyetujui

Pembimbing I



Hendra Harmain, SE. M.Pd
NIDN. 20100573202

Pembimbing II



Tri Ina Fadhila Rahma, M.E.I
NIDN. 2029019101

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ **ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA ASAM JAWA KCAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANABATU SELATAN** ”. Atas nama Sahril Sahputra, NIM. 0501162080 Program Studi Ekonomi Islam telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN – SU Medan pada tanggal 03 November 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 12 April 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Ekonomi Islam UIN – SU

Sekretaris

Ketua



Dr. Tuti Anggrani MA

NIDN. 2031057701

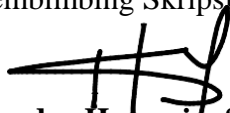


Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I

NIDN. 2026048901

Anggota

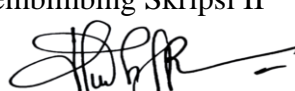
Pembimbing Skripsi I



Hendra Harmain, S.E. M. Pd

NIDN. 20100573202

Pembimbing Skripsi II



Tri Inda Fadhila Rahma, S.E.I, M.E.I

NIDN. 2029019101

Penguji I



Neila Susanti, MS

NIDN. 2028076902

Penguji II



Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I

NIDN. 2026048901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam

UIN – Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Sahril Sahputra 0501162080. Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dibawah bimbingan Pembimbing I. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd, Pembimbing II. Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan jalan di desa Asam Jawa, dengan melihat faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, wawancara, serta dokumen menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan, pembangunan tidak akan bermanfaat dan berjalan maksimal tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Partisipasi meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Desa, yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa yang dilihat dari ketiga bidang partisipasi yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan / evaluasi, cukup baik sebab karena ada dua hal yang mempengaruhi. Pertama, adanya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dengan membebaskan lahannya. Selain itu partisipasi masyarakat dapat dilihat dengan bentuk sumbangan masyarakat baik dalam hal tenaga maupun materi. Kedua pembangunan jalan di Desa Asam Jawa dipengaruhi oleh faktor pendukung yaitu sumbangan dan dukungan masyarakat serta faktor kesadaran atau kemauan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya Dana Desa dan rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan”**. Skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penyusun khususnya dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya. Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang terhebat dan teristimewa dalam hidup penulis yaitu Ayahanda tercinta Adi Musiadi dan Ibunda tercinta Asmiah Siregar yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan do'a yang tulus dan ikhlas untuk penulis.

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara

3. Bapak Imsar, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Bapak Hendra Harmain S.E, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan masukan ilmu, waktu semangat serta pengarahan kepada saya untuk kelancaran penulisan skripsi ini dengan baik
5. Para Dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai di lingkungan Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas segala didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
7. Ibu Khairina Tambunan, MEI yang juga turut membantu dalam perjuangan penulis, dimana sudah saya anggap seperti orang tua saya dan juga sebagai motivator untuk saya karena telah memberi masukan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewah kepada keluarga besar saya kedua orang tua saya, abang saya Ade Peratama, kakak ipar saya kristina, dan adik saya Juni Anggrenita. Atas segala Do'a dukungan dan kasih sayang
9. Kepada Kepala pemerintahan Desa Asam Jawa, Kepala BPD beserta para pegawai Desa Asam Jawa dan Masyarakat Desa Asam Jawa yang telah membantu penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan selama pembuatan skripsi
10. Kepada teman – teman seperjuangan Doni Wijaya, Khairil Amin, Maya Khalizah, Nur Afni Siahian, Putri Kusuma, Imam Sutoyo, Rizky Pratiwi, Nadia Fahira, Nanda Habibi Tanjung, Saiful Amri Batubara, Nanda Habibi Tanjung, Zichri Noor Zailani dan Ramadhani yang telah menjadi teman semasa diperkuliahan
11. Teman – teman seperjuangan Ekonomi Islam B Stambuk 2016
12. Seluruh pihak yang turut dan ikut serta membantu penulisan yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan penulis yakin bahwa berbagai kelemahan dan keterbatasan dapat terjadi di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, sehingga skripsi ini menjadi referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada perbaikan agar dapat mencapai hasil yang maksimal bagi penulis skripsi – skripsi selanjutnya serta bermanfaat kedepannya.

Akhirnya kepada ALLAH SWT penulis memohon ampun dan menyera diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Medan, 09 Juni 2021
Penulis

Sahril Sahputra
NIM. 0501162080

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORITIS	16
A. Partisipasi Masyarakat	16
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	16
a. Partisipasi Dalam Pembuatan Keputusan	19
b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan	19
c. Partisipasi Dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	20
d. Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan	20
2. Pengertian Masyarakat.....	21
3. Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	22
a. Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan	23
b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan	25
c. Partisipasi Dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	26
B. Pembangunan Desa.....	27
1. Pengertian Pembangunan Desa	27
2. Strategi Pembangunan	29
3. Saasaran Pembangunan Pedesaan	34
4. Kerangka Teoritis	38
5. Kajian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Metode Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	43

D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisa Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.	48
A. Gambaran Umum Desa Asam Jawa.....	48
1. Kondisi Geografis.	48
2. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Asam Jawa.....	50
3. Struktur Penduduk.	50
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Asam Jawa.	53
B. Hasil Penelitian.	55
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan / Evaluasi Dalam Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	55
2. Peran Pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembanguna di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.	69
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.	73
C. Pembahasan.....	85
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan / Evaluasi Dalam Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	85
a. Perencanaan.....	86
b. Pelaksanaan.	87
c. Pengawasan / Evaluasi.	89
2. Peran Pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembanguna di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.	90
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.	90
a. Faktor Pendukung.	91
b. Faktor Penghambat.....	94
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program Pembangunan di Desa Asam Jawa	7
Tabel 1.2 Daftar Hadir Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes	9
Tabel 3.1 Daftar Dokumen Yang Didapatkan.....	45
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Torgamba 2016 – 2020.....	46
Tabel 4.1 Keadaan dan Jumlah Penduduk Desa Asam Jawa 2016 – 2020.	50
Tabel 4.2 Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2020.....	52
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Desa Asam Jawa	53
Tabel 4.4 Tim pelaksana Evaluasi Pembuatan Jalan Baru Desa Asam Jawa	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Asam.	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk dapat membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda nantinya, demikian juga halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, Sedangkan pembangunan menurut Rogers adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa¹.

Pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya diikutinya dengan perubahan, perubahan yang terjadi di dalam struktur ekonomi, baik dari pertanian ke industri ataupun jasa, maupun perubahan kelembagaan, baik melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara terencana lebih dirasakan manfaatnya sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan di masyarakat yang belum atau baru berkembang² Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan diarahkan pada semua sektor dan di semua wilayah, termasuk di perdesaan. Pembangunan di desa penting dilakukan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di

¹ Rochajar dan Ardiantoro, Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial, (Jakarta: PT.Raja Grafindo.2011), h. 3.

² Subandi, Ekonomi Pembangunan (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 9-11.

pedesaan. Dalam proses pembangunan yang terjadi sifatnya yang tidak muncul secara alami dan begitu saja, melainkan prosesnya yang dilaksanakan dengan terencana. Artinya pembangunan tersebut harus melalui proses perencanaan terlebih dahulu untuk dapat menganalisis masalah – masalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk tercapainya tujuan yang ingin dicapai nantinya dengan mempertimbangkan kelemahan, kekuatan, peluang dan resiko yang akan dihadapi nantinya. Dengan demikian maka tujuan dari pembangunan itu sendiri akan tercapai apabila sudah memikirkan yang betul – betul diinginkan oleh masyarakat desa itu sendiri. kegiatan pembangunan di suatu negara, partisipasi serta peran dari masyarakat merupakan wujud dari sikap kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu taraf hidup mereka. Dengan adanya partisipasi yang diberikan masyarakat tersebut, disadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah, namun juga menuntut adanya keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu taraf hidupnya.

Kaitannya dengan proses dalam pembangunan di suatu negara berkembang, Desa merupakan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.³ Desa merupakan suatu wilayah yang masih sangat perlu diperhatikan untuk di jadikan sebagai titik dari sebuah pembangunan. Membangun Desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia yang tersebar di Kepulauan Nusantara. Hal ini mudah dipahami karena mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tersebar serta bermukim di pedesaan di seluruh kepulauan Nusantara. Maka dari itu kedudukan desa sangatlah penting mengingat desa sebagai tujuan penting dalam mencapai pembangunan yang

³Sadu Wasistio.Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. (Yogyakarta : Graha Ilmu. 2012), h.212 .

memperkuat struktur pemerintahan karna desa adalah agen pemerintahan yang nyata untuk disejahterakan, serta pada lembaga pemerintahan desa berperan penting untuk memperkuat lembaga tersebut karna sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dan terbukti memiliki daya tahan yang luar biasa sepanjang keberadaannya. Namun pada kondisi dilapangan yang terlihat dari keunggulan masyarakat pedesaan melalui sumber daya alamnya yang melimpah tidak setara perkembangannya dengan tumbuh dan berkembang dengan perkotaan. Beberapa hal yang mendasari pedesaan sulit menyejajarkan posisi dengan perkotaan ialah kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan pembangunan yang lambat dibandingkan pembangunan wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan karena pembangunan terfokus pada wilayah perkotaan yang menyebabkan terlambatnya perkembangan wilayah pedesaan.

Dengan demikian pembangunan di desa harus dijadikan titik sentral pembangunan Nasional. Dalam penyelenggaraan pembangunan di desa dengan melibatkan masyarakat desa, juga dapat menjadi cerminan terwujudnya good governance, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat serta sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal dengan masyarakat. Prinsip – prinsip good governance salah satu adanya partisipasi masyarakat, tegaknya hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun berupa informasi yang bebas dan dapat diakses oleh pihak pihak yang berkepentingan serta memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan efektifitas, dan efisiensi, akuntabilitas serta adanya visi strategis. ⁴ Dengan adanya pemberdayaan masyarakat desa merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

⁴ Josep. Tata Pemerintah Antara Good Governance dan Sound Governance (Jakarta : Indocamp. 2018) h. 24

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, dalam pembangunan desa yang di inginkan masyarakat perlu adanya perhatian yang lebih dari setiap kalangan, mulai dari rakyat biasa sampai segenap aparat di semua lapisan birokrasi, sebab masyarakat sebagai objek pembangunan yang mana masyarakat terkena langsung atas kebijakan dalam kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlunya masyarakat dilibatkan baik dari segi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya.

Dalam pelaksanaan otonomi masyarakat yang ada di desa tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif masyarakat serta di desa telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud demokrasi yang berfungsi menjadi lembaga legislatif desa.

sebagaimana yang dijelaskan didalam Q.S. An-Nisa/04 : 59 dijelaskan bagaimana kemajuan suatu masyarakat tergantung pada diri mereka sendiri⁵.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ؕ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya :

Hai orang – orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar – benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik – akibatnya.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), Q.S An – Nisa (4) : 59

Penjelasan ayat Q.S. An-Nisa/04 : 59 ialah bagaimana dalam suatu kelompok harus memiliki pemimpin dan kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya begitu pula kepada pemimpin yang sah yang menjadi tangan Tuhan dimuka bumi selama program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak bertentangan dengan Al – quran dan sunnah rasul⁶. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan masyarakat diwajibkan untuk selalu taat dan patuh terhadap pemimpin yang sah dan ditunjuk bersama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan pembangunan desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi dan sinergi untuk pencapaian tujuan dalam usaha pembangunan pedesaan.

Namun pada kenyataannya, Pemerintah tidak selalu sanggup membiayai sepenuhnya pembangunan di daerah-daerah. Maka dari itu, saat ini Jika kemampuan pemerintah dalam menyediakan pembangunan public sangat terbatas, sedangkan untuk partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, maka perlu terus-menerus didorong melalui suatu komunikasi pembangunan yang bersipat partisipasi.

Dalam pemanfaatan pembangunan di desa tentu perlunya dibutuhkan partisipasi masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Hal ini sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2e yang menyatakan bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa seperti kegiatan pembangunan, partisipasi atau peran masyarakat untuk menggunakan semua kemampuan dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.⁷

⁶ "Tafsir AL-Mukhtashar/ markaz tafsir riyadh", <https://tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat-59.html>, (diakses pada tanggal 19 juni 2020, pukul 12.34)

⁷ Undang - Undang No.6 Tahun 2014 *tentang desa* Pasal 68 Ayat 2e

Berdasarkan bentuk pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan di seluruh Indonesia khususnya di Desa Asam Jawa Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terdiri dari 22 dusun yaitu : Dusun Teluk Pinang, Kampung Mangga, Kampung Beringin, Asam Jawa Barat, Asam Jawa Timur, Bakti Aek Batu, Al'Amin Aek Batu, Cinta Makmur, Aek Batu Selatan, Aek Batu Utara, Aek Batu Timur, Milano, Herfinta, Tasik Rejo, Aek Torop Barat, Aek Torop Timur, Sumberjo I, Sumberjo II, Sumberjo III, Sumberjo IV, Sumberjo V, Sumberjo Pirbun

Sebagai wujud dari pelaksanaan pembangunan di Desa Asam Jawa, saat ini sudah dibangun beberapa pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pembangunan parit beton, pengerasan jalan, dan sumur bor di beberapa dusun serta penyediaan dan penyaluran air bersih di desa asam jawa dari tahun 2016 – 2020 , yang dapat dilihat dari data di bawah ini.

Tabel 1.1

**Program Pembangunan di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

No	Pembangunan	Dusun	Tahun
1	Pembanguna Paret Beton	Sumberjo Pasar V	2016
		Bakti,Aek Batu	2016
			2017
		Al'Amin Aek Batu	2016
			2017
		Aek Batu Selatan	2017
		Aek Batu Timur	2018
			2019
		Aek Batu Utara	2018
			2019

		Kampung Mangga	2018
		Kampung Beringin	2019
			2020
		Asam Jawa Barat	2019
			2020
2	Pengerasan Jalan	Sumberjo Pasar I	2016
		Sumberjo Pasar II	2016
			2017
		Aek Batu Selatan	2016
			2017
		Aek Torop Timur	2018
		Kampung Mangga	2018
		Sumberjo IV	2018
			2019
		Cinta Makmur	2018
		Aek Batu Utara	2019
2020			
Teluk Pinang	2019		
	2020		
Sumberjo Pasar III	2017		
3	Pembangunan Sumur Bor	Sumberjo Pasar V	2016
		Milano	2016
		Al'Amin Aek Batu	2016
			2017
		Aek Torop Barat	2018
			2019
			2020
Aek Torop Timur	2018		
Cinta Makmur	2019		

			2020
		Tasik Rejo	2019
			2020
		Teluk Pinang	2018
			2020
4	Rehap Lapangan Bola	Aek Torop Barat	2018
			2019
5	Pembangunan Paving Blok	Hervinta	2016
		Aek Batu Selatan	2016
		Bakti, Aek Batu	2017
		Asam Jawa Barat	2019
		Asam Jawa Timur	2020
		Sumberjo Pasar I	2017
6	Pembangunan PAMSIMAS	Sumberjo Pirbun	2016
		Sumberjo III	2016
		Sumberjo IV	2019

Sumber : Kantor Kepala Desa Asam Jawa

Dengan adanya pembangunan berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Asam Jawa telah melaksanakan pembangunan infrastruktur fisik terlihat dari tahun 2016 – 2020 dengan hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan yang tersebar di beberapa dusun di Desa Asam Jawa. Namun sayangnya proses pembangunan di Desa Asam Jawa, terdapat kendala di dalamnya yaitu kurangnya dan tidak berjalan peranan masyarakat desa Asam Jawa dalam partisipasi pembangunan desa yang terlihat dari data absensi Musyawarah Desa (MusDes) di bawah ini.

Tabel 1.2**Daftar Hadir Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes****Tahun Anggaran 2020**

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	M.P.L Tobing	Cinta Makmur	Kadus
2	M. Pangaribuan	Aek Batu Timur	RT
3	Mora Sutan Siregar	Kampung Mangga	Kadus
4	Kasdani	Sumberjo Pasar V	RT
5	Hidayat	Sumberjo Pasar IV	RT
6	Ahmad Zaini Daulay	Dusun Teluk Pinang	Kadus
7	Khairul Azmi	Dusun Aek Batu Utara	Kadus
8	Ahmad Yasir	Dusun Bakti	RT
9	M. Azhar Tanjung	Dusun Aek Batu Selatan	Karang Taruna
10	Aditia Sapriono	Aek Batu	
11	Rafandi	Aek batu Timur	
12	Syamsudin Pane	Aek Batu	Puskesmas
13	M. Tohir Hsb	Aek Batu	Puskesmas
14	Husni Thamrin	Asam Jawa Barat	Kadus
15	Dedy Kurniawan	Aek Torop Barat	Kadus
16	Sugito	Tasik Rejo	RT
17	Saipul Hsb	Tasik Rejo	RT
18	Ratnah Hsb	Kampung Mangga	RT
19	Baharuddin	Dusun Al'Amin Aek Batu	Kadus
20	Syarifuddin Pulungan	Dusun Bakti Aek Batu	Kadus
21	Darus Salam	Dusun Sumberjo III	Kadus
22	Amir Siddik Siregar	Dusu Sumberjo I	Kadus
23	Sopiyan	Dusun Sumberjo III	RT
24	Suheri	Sumberjo Pirbun	Kadus

25	M. Amri Pulungan	Asam Jawa Barat	RT
26	Samsul Bahri Siregar	Aek Torop	Kaur
27	Norma Yani Pangabeian	Aek Batu Al'Amin	Kader
28	Feriansya Ali Hsb	Aek Batu Utara	Sekdes
29	Iman Hasibuan	Asam Jawa Timur	Sekdes
30	Siti Kholijah Daulay	Asam Jawa Barat	Kaur
31	M. Syamsul	Tasik Rejo	Kadus
32	Abdul Khoir	Sumberjo II	Kadus
33	Dahrul	Aek Torop Timur	RT
34	Abdullah Ridwan	Aek Torop Timur	Kadus
35	Ahmad Husni Rambe	Aek Torop Barat	RT
36	Muhammad Yusuf	Kampung Beringin	Kadus
37	Edo Haryanto	Kampung Beringin	Kaur

Sumber : Kantor Kepala Desa Asam Jawa

Dari data absensi 22 dusun yang diharapkan datang, namun kita dapat mengetahui ada beberapa dusun yang tidak mengikuti kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) yaitu dusun Milano dan herfinta mengingat kegiatan ini merupakan penentu arah dan tujuan kemajuan dusun – dusun di Desa Asam Jawa. Menurut penuturan tokoh masyarakat di dusun Milano, bapak Ibrahim Siegar menuturkan bahwa masyarakat tidak terlalu peduli dengan Musyawarah Desa (Musdes) sebab setiap masyarakat dusun Milano mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk mengajukan pembangunan yang mereka inginkan di dusun namun jarang terealisasi sehingga membuat masyarakat tidak harmonis hubungan antara pemerintahan desa Asam Jawa.

Sedangkan di sisi lain dari hasil wawancara dengan kepala dusun Herfinta bapak Fery Andika Ritongah menjelaskan bahwa beliau tidak dapat hadir dalam Musyawarah Desa (Musdes) dikarenakan beliau sakit namun sedikit penjelasan dari beliau bahwasanya masyarakat di dusun mereka hanya sedikit yang menghadiri Musyawarah Dusun (Musdus)

sebab masyarakat melihat pembangunan yang terjadi di dusun Herfinta tidak secepat pembangunan di dusun dekat dengan setral kantor kepala desa Asam Jawa sehingga masyarakat dusun herfinta sedikit merasa kecewa dengan arah pembangunan yang terjadi.

Kasus diatas merupakan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan” dimana kasus yang ditemukan di lapangan terkait partisipasi masyarakat yang tidak sinkron dengan teori di UU No 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2e yang mewajibkan partisipasi masyarakat harus berperan aktif dalam pembangunan. Bahwasanya, dengan adanya undang – undang tersebut seharusnya masyarakat dapat aktif dan berperan penting dalam pembangunan. namun kenyataanya undang – undang tersebut terlihat tidak sinkron dengan masyarakat yang sulit aktif berpartisipasi dalam pembangunan khususnya di desa Asam Jawa Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Peran masyarakat serta partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan bisa berjalan secara maksimal, apabila masyarakat tidak bisa ikut sebagai penggerak administrator pembangunan.

Ketidakcocokan antara UU No 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2e dengan partisipasi masyarakat desa Asam Jawa Labuhanbatu Selatan yang mewajibkan partisipasi masyarakat harus berperan aktif dalam pembangunan yang menjadikan latar belakang masalah pada penelitian ini dikaitkan dengan pembangunan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan (evaluasi). Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul.

“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Peningkatan pembangunan yang terjadi di desa Asam Jawa tidak sebanding dengan kontribusi partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa
2. Partisipasi masyarakat desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba tergolong rendah sehingga bertolak belakang antara UU No 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2e yang mewajibkan partisipasi masyarakat harus berperan aktif didalam pembangunan desa
3. Strategi pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis membatasi penelitian hanya terfokus pada Partisipasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melihat sudah sejauhmana tingkat partisipasi di daerah tersebut ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan. Dalam batasan masalah ini peneliti menggunakan informan kepada Desa Asam Jawa yang terdiri dari 22 dusun dengan menggunakan 11 informan yang dapat mewakili 22 dusun lainnya untuk memberikan informasi secara mendalam dan detail serta mewakili dusun lainnya yang dibutuhkan peneliti nantinya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat (Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan / evaluasi) dalam pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembanguana di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?
3. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat desa (Perencanaan, pelaksanaan, dan Pengawasan) terhadap pembangunan Desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- b. Untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- c. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi atau sumbangsih pemikiran khususnya kepada masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai Ilmu Pengetahuan khususnya bidang ilmu pembangunan desa dan dapat dijadikan refrensi bahan keilmuan dalam bidang penelitian, juga memenuhi persyaratan Akademik dalam menyelesaikan studi di jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Menambah cakrawala tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan untuk memperluas pengetahuan di dunia pekerjaan.

2) Bagi Pemerintah desa dan Masyarakat desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Memberikan saran dan masukan bagi masyarakat desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang partisipasi dalam pembangunan desa serta memberikan informasi kepada pemerintahan daerah mengenai pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan serta menjadi bahan masukan untuk lebih mantap lagi menciptakan good governance dalam pembangunan selanjutnya.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation”, yang berarti mengambil bagian atau keikutsertaan. Menurut Aprilia Theresia partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.¹ Partisipasi memiliki keterlibatan mental atau pikiran dan emosi perasaan dalam usaha mencapai tujuan dan turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan serta merupakan masukan dalam setiap proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran maupun sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Isbandi mengemukakan Partisipasi ialah ikut sertanya masyarakat melalui proses pengidentifikasi suatu masalah serta potensi yang ada di dalam masyarakat, dengan cara pengambilan keputusan melalui alternatif solusi untuk menangani suatu masalah, dengan pelaksanaan upaya yang mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.² Sedangkan Slamet menyatakan bahwasanya partisipasi berarti peran serta perorangan atau sekelompok masyarakat secara aktif dalam proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi ialah keterlibatan masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara pengambilan keputusan dengan mengadakan musyawarah sebelum kesepakatan disetujui untuk dilaksanakan.

¹ Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.198

² Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007). h 26.

³ Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), h. 7.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 dalam pasal Pasal 1 ayat 41 menyatakan bahwa: Partisipasi masyarakat merupakan peran serta keikutsertaan warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran keikutsertaan atau partisipasi Masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun pengawasan dan evaluasi.⁴ Partisipasi masyarakat itu sendiri sebenarnya mempunyai banyak bentuk, baik berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan yang sifatnya tidak secara langsung, seperti sumbangan tenaga, dana, pikiran, maupun pendapat dalam suatu pembuatan kebijakan pemerintahan, demikian pulak seorang pekerja tidak boleh dibebani pekerjaan yang terlalu berat diluar kemampuannya⁵.

Namun pada hakikatnya partisipasi seringkali ditentukan secara massa yakni dari banyaknya individu yang terlibat. Padahal partisipasi masyarakat tersebut pada dasarnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi, sehingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum dioptimalkan dijadikan kegiatan yang tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan . Se jauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam perencanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat perencanaan tapi juga mulai tahapan pelaksanaan bahkan pengambilan keputusan.⁶

Partisipasi itu sendiri dalam konteks pembangunan desa sebenarnya mencakup keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam

⁴Undang – Undang No.23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah* Pasal 1 ayat (41)

⁵ Imsar, “*Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Kopi Gayo (Arbika) Kabupaten Bener Meriah. (Studi Kasus: Desa Pantan Tengah Kecamatan Permata)*”. Laporan Penelitian 2018 h.27

⁶ Efriadi, “Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Slingingi)” (Skripsi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU Medan, 2010), h.5

proses pengambilan keputusan, di dalam penerapan program tersebut adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan serta adanya keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan tersebut. Partisipasi di setiap pembangunan bisa digunakan sebagai sebuah metodologi yang dapat mengantarkan masyarakat untuk dapat memahami masalah-masalah yang akan dihadapi nantinya, sehingga dapat mengetahui dan mencari solusi dari masalah yang akan dihadapi tersebut, sehingga dapat memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

Partisipasi berdasarkan cara keterlibatannya dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi langsung dan tidak langsung.

- a. Partisipasi langsung adalah keterlibatan seseorang, kelompok maupun masyarakat dalam berperan aktif, baik itu menyediakan tenaga pada proses pembangunan, maupun memberikan kontribusi pemikiran serta mengikuti dalam pembuatan rancangan kegiatan pembangunan.
- b. Partisipasi tidak langsung sendiri, dimana seseorang mewakilkan hak berpartisipasi kepada orang lain yang bisa mewakilinya dalam aktifitas partisipasif.

Sejalan dengan pemikiran diatas Hobley mengidentifikasi adanya tujuh tipe partisipasi yaitu :

- 1) Partisipasi Pasif
Informasi yang diperuntukan terbatas pada kalangan profesional diluar klompok sasaran
- 2) Partisipasi Informatif
Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan mempengaruhi
- 3) Partisipasi
Masyarakat berpartisipasi dengan cara konsultasi
- 4) Konsultatif

- Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama
- 5) Partisipasi Fungsional
Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek
 - 6) Partisipasi Interaktif
Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan.
 - 7) Zelf Mobilization (Mandiri)
Masyarakat memegang kendali pemanfaatan sumber yang ada.⁷

Sedangkan menurut Yadav bahwa ada empat bentuk partisipasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Partisipasi Dalam Pembuatan Keputusan

Setiap Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaranya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal.

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan

⁷Ibid., h. 205 – 206.

diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Selain partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kegiatan khusus untuk mengarahkan warga masyarakat untuk memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati

c. Partisipasi memerlukan Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan

untuk kegiatan pembangunan sangat diperlukan pemantauan maupun evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan perkembangan kegiatan yang ada serta perilaku aparat dalam pembangunan sangat diperlukan.

d. Partisipasi Memerlukan Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi memerlukan pemanfaatan dari hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan utama pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu taraf hidup masyarakat banyak, sehingga pemerataan dari hasil pembangunan merupakan tujuan paling utama. Adanya hasil dari pembangunan dapat meningkatkan kemauan dan kesukarelaan dari lapisan masyarakat untuk selalu dapat berpartisipasi aktif dalam setiap program pembangunan pada masa yang akan datang. Namun, pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat

perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, seringkali menganggap bahwasanya dengan selesainya pelaksanaan dari pembangunan maka secara otomatis manfaatnya pasti akan dapat dirasakan oleh masyarakat pada sasaran. Padahal seringkali masyarakat sasaran tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

Partisipasi masyarakat tentu tidak bergerak begitu saja tanpa adanya hal-hal yang mendorong mereka untuk terlibat dalam pembangunan. Masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan yaitu:

- 1) Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kegiatan masyarakat.
- 2) Dalam pembangunan terjamin adanya kontrol dari masyarakat.

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memperdayakan potensi dalam perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan serta kebutuhan yang nyata ada di dalam masyarakat, peningkatan motivasi serta peran dan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, melalui peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat ialah keseluruhan hubungan antara sesama manusia. Karl Marx, menyatakan bahwasanya masyarakat adalah sebuah struktur yang hanya memiliki ketergantungan maupun perkembangannya bisa saja muncul karena adanya pertentangan diantara kelompok yang terpecah secara ekonomis.

Menurut Harold J Laski masyarakat adalah “sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai keinginan mereka bersama sama, bahwa masyarakat mencakup semua hubungan dalam kelompok di suatu wilayah”. Dari pendapat Harold J Laski bawah manusia mempunyai bermacam macam keinginan dan tujuan yang ingin dicapainya, ntuk itu mereka sering merasa perlu untuk melaksanakan kemauannya atas orang lain atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini perlunya ada hukum di masyarakat, dengan adanya hukum di masyarakat maka manusia dalam kelompok takut untuk mengganggu hak manusia lainnya.

Menurut An - Nabhani mengemukakan masyarakat yaitu sekelompok atau individu yang memiliki pemikiran perasaan, serta sistem ataupun aturan yang sama, dan sering terjadi interaksi antara satu sama lain karena kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri.⁸

3. Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Telaahan tentang pengertian “Partisipasi” yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikut sertaan secara aktif dan suka rela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi,

⁸<http://www.pelajaran.co.id/2017/03/pengertian-masyarakat-menurut-definisi-para-ahli-terlengkap.html>. Diunduh pada tanggal 12 Februari 2020

pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai karena itu, Yadav dalam bukunya Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto mengemukakan tentang adanya empat macam aktivitas yang menunjukkan adanya kegiatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan yaitu, adanya partisipasi dalam perencanaan pembangunan, adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

a. Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Partisipasi ataupun peran dari masyarakat dalam pembangunan terkhusus pedesaan merupakan aktualisasi dari adanya ketersediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan.

“Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relative terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relative banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program yang ada dimasyarakat”.⁹ Sedangkan dalam islam pun mengajarkan sebagaimana dalam Q.S Ali-Imran/3 : 159 dijelaskan bagaimana kemajuan suatu masyarakat tergantung pada diri mereka sendiri.

⁹Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Desa Partisipatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), Cetakan Pertama, h.34

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹⁰

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan), dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan penyusunan program pembangunan secara terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilakukan secara optimal.¹¹

Adapun beberapa manfaat perencanaan pembangunan ialah yaitu :

- a) Perencanaan nantinya mampu membuat suatu pengarahan kegiatan, dengan adanya pedoman pelaksanaan kegiatan-

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), Q.S Ali-Imran (3) : 159

¹¹ Ibid, h. 35

kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian untuk tujuan pembangunan.

- b) Dengan adanya perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (fore casting) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang nantinya dilalui, prediksi dilakukan untuk mengetahui potensi serta prospek perkembangan yang terjadi nantinya, akan tetapi juga untuk mengetahui hambatan dan resiko – resiko yang mungkin dihadapi.
- c) Perencanaan memberikan peluang untuk dapat memilih berbagai solusi alternative tentang cara terbaik ataupun kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
- d) Dengan adanya perencanaan, penyusunan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Memilih urutan – urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatannya.

b. Partisipasi Dalam Pelaksana Kegiatan

Partisipasi masyarakat untuk pembangunan, sering disalah artikan sebab partisipasi di masyarakat banyak pada umumnya lebih sedikit untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Sedangkan dilain sisi, lapisan yang terdiri atas orang-orang kaya dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, hal yang sering terlupakan dalam pelaksanaan pembangunan ialah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-

proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir dapat terus dinikmati memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya).¹²

c. Partisipasi Dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Agar tujuannya yang ingin dicapai seperti yang diinginkan, tetapi juga memerlukan atau memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Untuk itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengumpulkan segala informasi yang berkaitan erat dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat dalam pembangunan yang diperlukan. Begitu halnya dengan pembangunan yang terjadi di Desa Asam Jawa, masyarakat diharapkan mampu mengevaluasi pembangunan yang dilakukan di Desa tersebut.

Fungsi tujuan umum pengawasan itu sendiri ialah untuk mengetahui, menggambarkan dan mengevaluasi proses pelaksanaan dilapangan. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, mengetahui dan mengukur antara pelaksanaan di lapangan sesuai dengan standar yang diharapkan, mengkaji kesesuaian tindakan actor yang terlibat sesuai fungsinya disemua tingkatan, mengetahui gambaran indikasi adanya perubahan sosial ekonomi, masyarakat baik positif maupun negatif, memperoleh rekomendasi kebijaksanaan, dan membangun system monitoring yang dapat diandalkan untuk program pembangunan selanjutnya,

¹² Ibid, h. 83

keterlibatan masyarakat dapat lebih terlaksana apabila rencana pembangunan itu sendiri berorientasi kepada kepentingan masyarakat terutama perlunya diberikan perhatian terhadap aspek dan pemerataan pembangunan.¹³

B. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pengertian pembangunan pada umumnya, para ahli memberikan definisi dan pengertian yang bermacam-macam seperti halnya pengertian perencanaan. Pengertian pembangunan bisa saja diartikan berbeda dari satu orang dengan orang lain, dari satu daerah dengan daerah yang lainnya, dari satu Negara dengan Negara yang lain.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo pembangunan merupakan suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatannya yang dianggap lebih baik (lebih diinginkan).¹⁴

Sedangkan menurut Rostow yang diambil dalam Mansor Fakhri mendefinisikan pembangunan yang dikaitkan dengan perubahan sosial yakni suatu pembangunan semata hanyalah untuk merubah kehidupan masyarakat itu sendiri atau perubahan masyarakat dari tradisional ke modern. Tahapan perkembangannya dalam pembangunan di masyarakat tradisional, melalui prakondisi lepas landas, gerak menuju kearah kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Tahapan ini ialah tahap yang tinggal landas yang didorong oleh satu satu sektor ataupun lebih.¹⁵ Siagian mengemukakan pendapat mengenai

¹³ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), h. 208.

¹⁴ Ibid., h. 189

¹⁵ Masril Karim, *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kaiyasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan*, (Skripsi Progam Studi Ilmu Adminitrasi, Universitas Tidore, Ternate, 2010), h.27

pembangunan dimana pembangunan ialah serangkaian usaha untuk menumbuhkan ataupun melakukan perubahan yang sudah terencana matang dan dilakukan oleh suatu bangsa, ataupun negara maupun pemerintah, untuk menuju ke arah modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).¹⁶

Dalam modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggap sebagai suatu proses pembangunan dimana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern yang menggantikan alat-alat tradisional dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dengan adanya pembangunan maka pertumbuhan yang terjadi dapat berupa perkembangan/perluasan (development) dari adanya aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. Perlu diketahui konsep pembangunan dimasa lalu berbeda dengan yang ada dimasa sekarang ini, di masa lalu pembangunan lebih cenderung mengarah kepada sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah (top-down) dan sekarang ini mulai diminimalkan sebab pembangunan seperti ini tidak mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan rakyat, akibatnya hasil dari program – program pembangunan yang dilancarkan tidak berhubungan langsung dengan pemenuh kebutuhan mendasar masyarakat khususnya kalangan miskin, meskipun telah menghabiskan biaya yang besar, dan munculnya konsep pembangunan alternatif yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (community based development), yang berparadigma bersifat bottom up dan menggunakan pendekatan dari masyarakat sehingga dapat menyatu dengan masyarakat dan menyertakan partisipasi masyarakat

¹⁶Siagian, Sondang P, *Administrasi Pembangunan . Konsep, Dimensi dan Strateginya*, (Jakarta: Gunung Agung, 2007) h.2

desa tersebut, dan bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar serta sangat menyertakan partisipasi orang – orang luar.¹⁷

2. Strategi Pembangunan

Pemerintah di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, telah mencanangkan berbagai macam program pembangunan pedesaan, Program-program pembangunan pedesaan tersebut antara lain terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah :

- a. Pembangunan pertanian (agricultural development)
- b. Industrialisasi pedesaan (rural industrialization)
- c. Pembangunan masyarakat desa harus terpadu (integrated rural development)
- d. Strategi pusat pertumbuhan (growth centre strategy)

Uraian berikut berusaha membahas secara ringkas asumsi-asumsi dasar, sasaran dan bagaimana pelaksanaan program-program tersebut, serta beberapa hambatan ketika diimplementasikan.

- a. Pembangunan Pertanian (agricultural development)

Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan output dan pendapatan mereka. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk kebutuhan pangan (baik dipedesaan maupun diperkotaan), tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumah tanggaan, serta untuk menghasilkan produk pertanian ekspor yang dibutuhkan oleh negara maju. Implementasi program pembangunan pertanian ini telah merombak sistem pertanian

¹⁷ Zubaedi. Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik (Yogyakarta : Kencana 2016) h. 140

dan model usaha tani. Karena itu, lahir sebutan green revolution (revolusi hijau).

Di Indonesia, seperti telah diutarakan dalam uraian terdahulu, program pembangunan pertanian yang dicanangkan pemerintah Orde Baru secara intensif pada Pelita 1 telah membuahkan hasil yang spektakuler. Indonesia yang semula tergolong pengimpor beras nomor satu didunia menjadi negara berswasembada pangan.¹⁸

b. Industrialisasi Pedesaan (Rural Industrialization)

Tujuan utama dari adanya program industrialisasi di pedesaan yaitu untuk mengembangkan industri kecil maupun sektor kerajinan. Industrialisasi pedesaan merupakan alternatif yang sangat strategis bagi upaya menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dipedesaan serta keterbatasan elastisitas tenaga kerja. Prospek program ini diyakini cukup cerah antara lain karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Persyaratan dan keterampilan yang dibutuhkan tidaklah terlalu sukar sehingga mudah mengajak anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
- b) Kebutuhan investasinya terjangkau oleh sebagian besar anggota masyarakat desa sehingga bisa merata kesegenap lapisan masyarakat.
- c) Bahan baku produksi dapat di tekan.
- d) Program ini dalam implementasinya menjumpai beberapa hambatan sehingga sukar mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Hambatan tersebut antara lain terletak pada nilai-nilai sosial yang berkembang dalam

¹⁸ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), h. 40-41.

masyarakat desa sendiri. Anggota masyarakat desa terkesan kurang siap menyongsong industrialisasi. Mereka pada umumnya mudah merasa puas dengan hasil produksi yang pernah dicapai. Mereka juga kurang berani mengambil resiko, dan oleh karenanya sulit didorong untuk melakukan reinvestasi. Keterampilan mereka yang dipergunakan sederhana, kapasitas produksinya terbatas, dan manajemennya pun lemah sehingga sangat sukar meningkatkan kualitas produksinya.¹⁹ Hambatan lain adalah tiadanya organic link antara sektor besar dengan sektor yang lebih kecil. Mereka tampak berjalan sendiri-sendiri, saling berkompetensi, dan sukar melembagakan kerjasama dalam meningkatkan proses produksi, introduksi teknologi baru maupun dalam memasarkan hasil produksi. Malah ketika para pemilik modal menanamkan investasinya didesa, yang berkembang kemudian bukanlah industri pedesaan tetapi industri kapital intensif yang berada dalam setting desa. Industri semacam ini tidak menciptakan banyak kesempatan kerja, terutama karena anggota masyarakat desa tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Sumber daya mereka lemah.

c. Pembangunan Masyarakat Desa Harus Terpadu (Integrated Rural Development)

Tujuan utama program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Menurut Waterston, ada enam elemen dasar yang melekat dalam program pembangunan semacam ini, yaitu:

- a) Pembangunan Pertanian dengan menggunakan padat karya (Labour Intensive)

¹⁹Ibid, h. 44

- b) Memperluas kesempatan kerja
- c) Menciptakan tenaga kerja berskala kecil, dengan cara mengembangkan industri kecil di pedesaan
- d) Mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
- e) Mengembangkan daerah perkotaan yang mampu memberi dukungan pada pembangunan pedesaan, dan,
- f) membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi proyek multisector.

Prinsip – prinsip serupa juga pernah di lontarkan oleh Rehovot School⁶ dalam mendekati pembangunan masyarakat desa terpadu, yang antara lain mencakup :

- a) Pertumbuhan pertanian sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan pedesaan tidak luput dari adanya diversifikasi usaha petani, keluarga petani sebagai salah satu unit organisasi, organisasi dibentuk oleh dan untuk petani, serta terciptanya industrialisasi pedesaan.
- b) Urbanisasi dapat dijadikan sebagai faktor promosi untuk pembangunan pedesaan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini lebih menekankan transformasi sektor pertanian sebagai the prime mover. Transformasi tersebut dapat menciptakan perubahan secara gradual tetapi pasti dari pertanian subsistence menjadi pertanian komersial. Pendekatan ini juga menganjurkan adanya fusi atau gabungan dari strategi top-down dan strategi bottom-up. Strategi top-down dianggap sudah terlalu banyak melakukan pemaksaan, sementara strategi bottom-up dianggap sudah terlalu percaya pada kekuatan lokal dan mengingkari kelemahan yang terdapat ditingkat bawah. Itulah sebabnya penggabungan dua macam strategi tersebut diyakini akan

banyak mendatangkan kesejahteraan bagi segenap anggota masyarakat.

d. Strategi Pusat Pertumbuhan (Growth Centre Strategy)

Salah satu elemen yang terabaikan dalam program-program pembangunan pedesaan yang telah didiskusikan (terutama program pembanguann masyarakat desa terpadu) adalah ruang (space). Program-program tersebut lebih memberi tekanan pada perencanaan dan implementasi proyek saja, dan kurang memperhatikan keterkaitan dimana proyek tersebut harus memiliki ruang pengembangan ekonomi yang sangat luas, terutama dengan posisi kota. Itulah sebabnya berbagai macam infrastruktur dan fasilitas terkesan dibangun hanya untuk kepentingan proyek itu sendiri, tanpa memperhatikan jarak yang ideal denga kota dengan fungsinya sebagai pasar ataupun saluran distribusi hasil produk.

Strategi pusat pertumbuhan adalah sebuah alternatif yang diharapkan memecahkan masalah ini. Cara yang ditempuh yaitu dengan cara membangun atau meembangkan sebuah pasar didekat pedesaan. Pasar ini fungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, sekaligus sebagai pusat informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen, atau lazim disebut dengan the centres of „demonstration effect“ of customer goods. Informasi semacam itu besar sekali maknanya bagi pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi gamblang dalam mengembangkan usaha. Pertumbuhan pusat semacam itu harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga secara sosial tetap dekat denga desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota.

Dengan demikian, pusat pertumbuhan ini disamping secara langsung dapat menjawab berbagai persoalan pemasaran atau

distribusi hasil produksi pertanian, juga dapat dikelola sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masyarakat desa. Pengelolaan semacam ini akan mengurangi ketergantungan dan sangat dibutuhkan bagi pengembangan kewiraswastan. Pusat pertumbuhan itu akan melahirkan sebuah komunitas desa kota (urban), yang ditandai dengan kemauan untuk menerima prinsip-prinsip ekonomi uang namun tetap tidak kehilangan nilai-nilai juga sesuai dengan iklim usaha masyarakat desa. Pusat pertumbuhan itu juga tidak terlalu besar, sehingga setiap perkembangan yang mengarah pada lahirnya monopoli oleh kelompok ekonomi kuat dapat segera dikontrol dan dihindari.

Banyak pengamat melihat bahwa strategi pusat pertumbuhan ternyata juga kurang begitu berhasil meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa. Konsep pusat pertumbuhan ternyata tidak melahirkan pemukiman baru dengan komunitas berkarakter yang dibayangkan masih mempertahankan nilai-nilai desa tetapi mau menerima nilai-nilai kota. Yang justru tumbuh adalah sebuah reartikulasi pola pemikiran desa, yang dihuni oleh orang dengan memanfaatkan berbagai macam fasilitas yang hadir bersama dengan program tersebut.

3. Sasaran Pembangunan Pedesaan

Pembangunan desa yang dilakukan haruslah sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, dan aspirasi masyarakat serta prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Untuk meraih arah tujuan pembangunan, maka seluruh potensi yang ada, harus tercipta serta digunakan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, paradigma untuk pembangunan yang dikembangkan sekarang ini

adalah paradigma pemberdayaan yang berintikan partisipasi masyarakat.²⁰

Pembangunan di desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas taraf hidup warga desa. Sehubungan dengan itu, pembangunan yang dilakukan harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat desa itu sendiri.²¹ Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat (4) huruf (d) menyebutkan “salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat di dorong untuk ada dalam setiap tahapan perencanaan”.²² Lebih lanjut dikemukakan, bahwa nilai yang tertanam sangat terpenting dalam melibatkan masyarakat desa dengan maksud tujuan pembangunan masyarakat di desa secara etis harus pula melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental untuk kemajuan desa tersebut. Masyarakat juga dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, sebab apalagi kita dapat menyadari percepatan pembangunan harus dimulai dari bottom up, yaitu menggerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan²³.

Sehingga sasaran umum yang diharapkan dapat dicapai adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya pertanian (agricultural resource based) yang ditunjang oleh kegiatan sektor non pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil. Sasaran umum tersebut dapat kita kelompokkan menjadi beberapa sasaran yang khusus sebagai berikut :

²⁰ Ginandjar Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta : Pt.Pustaka Cidesindo. 1996) h. 60

²¹Intan P. N. Damanik dan M. E. Tahitu, “Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Kasus: Masyarakat Desa Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah)”. *Jurnal Agroforestri*. Vol. II No 1, Maret 2007, h. 6

²²Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* Pasal 2 ayat (4) huruf (d).

²³ Ismail Nasution, “ Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Yang Dibiayai Oleh Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan 2015 – 2016” (Skripsi, Ekonomi Pembangunan USU Medan, 2017), h.4

- a) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar di setiap maupun semua wilayah
- b) Terlaksananya pembangunan yang ekonominya mencakup ketersediaan sumber – sumber penghasilan, produktifitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efesien yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- c) Tercapainya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.²⁴
- d) Konsep pembangunan dari Bawah (Bottom Up Planning)

Perlu disadari bahwa dengan adanya pembangunan yang dilakukan di pedesaan secara luas, namun hasilnya dianggap masih belum dapat memuaskan, dan dapat dilihat dari keterlibatan peran dari Masyarakat serta dari peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek, tetapi harus dipandang pula sebagai subyek pembangunan. Pembangunan pedesaan harus diletakkan di dalam konteks: (1) sebagai salah satu upaya untuk mempercepat arah pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana dalam pembangunan untuk dapat memberdayakan masyarakat, dan (2) sebagai upaya mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi daerah dalam arti luas secara efektif dan kokoh. Rencana pembangunan di daerah haruslah disusun berdasarkan potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada sekarang. Kondisi itu terdiri dari salah satu adanya sumberdaya alam, sumberdaya manusia,

²⁴ Rahardjo Adisasmita, h. 23-24.

sumberdaya modal, prasarana dan sarana pembangunan, teknologi, aspirasi masyarakat setempat, dan lainnya.

Karena dana atau anggaran pembangunan yang tersedia terbatas, sedangkan program pembanguann yang dibutuhkan relatif banyak, maka perlu dilakukan : (1) penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan, penentuan proritas program pembangunan harus dilakukan secara kriteria yang dapat terukur nantinya, dan (2) didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut. Penentuan arah program pembangunan oleh masyarakat haruslah yang bersangkutan dan merupakan bentuk adanya perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut bottom up planning. Peningkatan partisipasi di masyarakat merupakan bentuk adanya pemberdayaan masyarakat (social empowering) secara nyata dan terarah. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kepeduliaan, kesediaan, dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan didaerah tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut antara lain, mereka bersedia menyerahkan sebagai lahan/tanahnya yang dilewati oleh pembangunan jalan desa atau jaringan irigasi, tanpa meminta pembayaran ganti rugi harga lahan/tanah tersebut, kerja bersama-sama dalam pembangunan jalan desa (tanpa diberikan upah), dan lainnya.²⁵ Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan – perubahan yang penting dalam susunan struktur, sistem sosial ekonomi, sikap dari masyarakt serta lembaga – lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi,

²⁵ Ibid, h. 25

pengangguran, kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut.²⁶

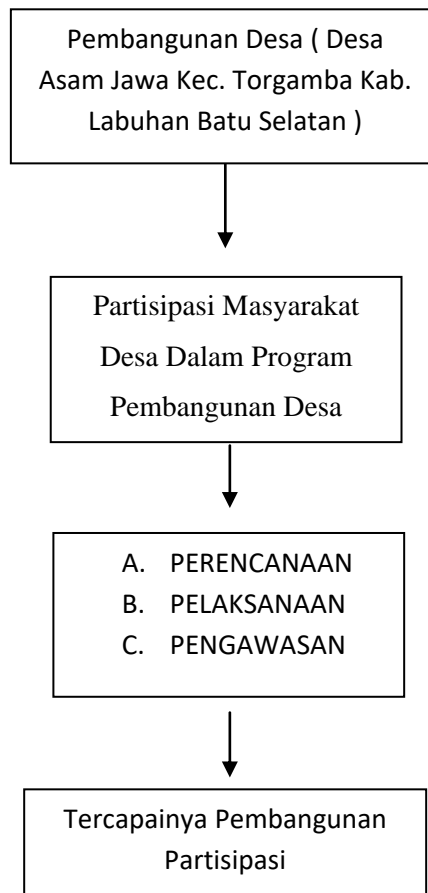
²⁶Michael P Todaro, & Stephen C.Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta : Erlangga, 2006), h.312

4. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu modl yang menerangkan bagaimana hubungan teori dengan aplikasi penelitian. Kerangka teoritis berangkat dari suatu teori kemudian dikembangkan menjadi bentuk suatu penelitian. Kerangka teoritis digunakan untuk menggambar suatu penelitian.

Adapun kerangka teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan pada bagian dibawah ini :

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran



5. Kajian Terdahulu

Tema partisipasi masyarakat terhadap pembangunan memang salah satu tema yang menarik untuk dijadikan kajian riset oleh para peneliti. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki tentang partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa yaitu :

- a. Skripsi Ismail Nasution, tentang “Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Yang Dibiayai Oleh Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan 2015 – 2016”.²⁷ Penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan yang di biayai oleh keuangan dana desa di Kecamatan Sei Dadap berdasarkan tangga partisipasi Arnstein berada pada tingkat Partnership (kemitraan). Berdasarkan pengujian bentuk partisipasi masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi diketahui bahwa pada tahap perencanaan, bentuk partisipasi dipengaruhi oleh usia dan tingkat pendidikan. Pada tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, pendidikan dan penghasilan. Pada tahap pengawasan, bentuk partisipasi di pengaruhi oleh jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan.
- b. Skripsi Muhammad Fikri Eka D, tentang “ Peran Aparatur Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Deskriptif di Desa Sabandar Kabupaten Cianjur) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan faktor – faktor yang mempengaruhi dalam tingkat partisipasi masyarakat. Dan dalam hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat desa Sabandar dikatakan baik dan peran aparatur desa sangat baik dalam

²⁷ Ismail Nasution, “ Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Yang Dibiayai Oleh Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan 2015 – 2016”(Skripsi, Fakultas Ekonomi USU Medan, 2017), h.4

memimpin, aparatur desa dengan masyarakat saling bekerja sama dalam perencanaan pembangunan desa.²⁸

- c. Skripsi Wahyuddin, tentang “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa” Penelitian ini menjelaskan untuk mengetahui “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa”. Sumber data diperoleh dengan cara Survey, Wawancara, Observasi, Koesioner, dan Analisis Data Menggunakan Skala Likert.²⁹ Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tanah Karaeng yaitu dilihat keempat bidang partisipasi yaitu perencanaan mencapai skor 58.6 persen atau berada pada kategori sedang, pelaksanaan mencapai skor 75.3 persen atau berada pada kategori tinggi, evaluasi/monitoring 77.4 persen berada pada kategori tinggi, dan pemanfaatan hasil 81.8 persen berada pada kategori sangat tinggi. Skor partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tanah Karaeng tergolong pada kategori tinggi yang dibuktikan oleh skor gabungan bidang - bidang partisipasi rata-rata 77.3 persen, hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tanah Karaeng tergolong tinggi .
- d. Skripsi Efriadi, tentang “ Peran Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)” penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan pemerintah desa untuk meningkatkan

²⁸ Muhammad Fikri Eka D, “ Peran Aparatur Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Deskriptif di Desa Sabandar Kabupaten Cianjur)” (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, 2018), h,3

²⁹ Wahyuddin, “ Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ALAUDDIN Makasar, 2018), h.9

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dari hasil penelitian diperoleh ternyata peran pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak merujuk kepada program – program dan tugas serta fungsi pemerintah desa itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang masih rendah di desa Pulau Kumpai, dan hasil pembangunan yang dilaksanakanpun masih kurang maksimal serta kurang bermanfaat bagi masyarakat desa Pulau Kumpai.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

A. Pengertian Metode Penelitian

Metodologi Penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi Metodologi artinya “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis hingga menyusun laporannya”¹ adapun metode yang penulis gunakan adalah :

1) Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang di lakukan dalam kancah yang sebenarnya.² Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi³.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian menggunakan penelitian lapangan maka dalam mengumpulkan data-datanya mengambil dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan permasalahan tersebut. Selain lapangan, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan

¹Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, Cetakan 10, Bumi Aksara, (Jakarta, 2009), h. 1

²Sumadi Suryabrata, “*Metode Penelitian*” Raja Grafindo Persada: (Jakarta 1998) h.22

³Nur Ahmadi Bi Rahmani “*Metodologi Penelitian Ekonomi*”. (Medan: Febi UIN-SU Press,2016),H. 4.

berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang di angkat penulis.

b) Sifat Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti . Dalam hal ini, data primer yang di peroleh peneliti bersumber dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimanapun para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara face to face untuk mendapatkan hasil atau data yang falid dari informan secara langsung agar dapat menggambarkan hasil penelitian lebih muda.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁴ Data sekunder berupa dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, jurnal, skripsi dan buku-buku sebagai teori dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan yang akan di teliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian pada Kantor Kepala Desa Asam Jawa, dan dusun yang ada di desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2019 s.d. selesai

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat yaitu

⁴ Iqbal, Hasan, “*Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara : (Jakarta, 2004), h.19

beberapa masyarakat desa dan pemerintahan desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data di lokasi penelitian penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara (interview)

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang di kerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.⁵ Teknik ini digunakan untuk menjaring data – data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan informan sesuai panduan wawancara yang hasilnya dicatat. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah handphone yang dilengkapi pula dengan catatan-catatan kecil peneliti. Wawancara dilakukan bersamaan dengan observasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data yang tersedia yaitu biasanya Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat menyurat, peraturan daerah, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Berikut adalah dokumen yang didapatkan dari penelitian ini sebagai pendukung data sekunder.⁶

⁵ Juliansyah, Noor, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta : Kencana 2011) hlm 141

⁶ Ibid, hlm 62

Tabel 3.1 Daftar Dokumen Yang Didapatkan

No	Dokumen	Substansi
1	Buku Profil Desa Asam Jawa Tahun 2017	Sejarah Berdirinya Desa Asam Jawa, Data Penduduk, Visi dan Misi, Peta Desa, Struktur Organisasi
2	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015	Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3	Praturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005	Tentang komite kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur
4	Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014	Tentang Pemerintahan Daerah
5	Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014	Tentang Desa
6	Permendes Nomor 8 Tahun 2016	Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Asam Jawa

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Torgamba 2016 - 2020

Tahun	Jumlah	
	Jiwa	KK
2016	113.470	28.368
2017	115.948	28.987
2018	119.767	29.942
2019	125.056	31.264
2020	131.996	32.999

Sumber : Data BPS, Labuhanbatu Selatan Dalam Angka, Dari Tahun 2016 – 2020.⁷

Dari data diatas dapat terlihat terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2016 - 2020, hal itu dikarenakan semakin banyaknya masyarakat dari luar daerah desa Asam Jawa yang berminat untuk menjalankan serta mengembang perkebunan kelapa sawit

c. Mengakses Situs Internet (website)

Metode ini di lakukan dengan menelusuri website/situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang peranan masyarakat dalam pembangunan serta berbagai situs lainnya yang di jadikan landsaran dasar atau referensi untuk mempelajari berbagai teori dan praktek yang sedang penulis teliti.

⁷ <http://www.bps.go.id/Badan-Pusat-Statisti.Labuhanbatu-Selatan-Dalam-Angka2016-2020> . Diunduh pada tanggal 5 Mei 2020

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dapat dilakukan dengan model analisis deskriptif kualitatif di mana intinya adalah interaksi antar komponen penelitian maupun proses pengumpulan data selama proses penelitian. Analisa data dilakukan untuk menganalisis bagaimanakah partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Asam Jawa. Analisis pada data kualitatif yang dilakukan meliputi.

a. Keabsahan Data (Triangulasi)

Triangulasi adalah teknik memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain.⁸ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi teknik. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Peneliti melakukan pengecekan data melalui berbagai sumber dengan melakukan wawancara ke beberapa informan, informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun oranglain ataupun suatu kejadian maupun suatu hal kepada peneliti⁹ yaitu Aparatur Desa Asam Jawa, dan masyarakat Desa Asam Jawa.

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial yaitu, memanfaatkan bahan-bahan yang terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial peneliti dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui arsip, catatan lapangan, literatur buku, rekaman atau foto yang digunakan untuk mendukung analisis data.

⁸ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), h. 330

⁹ Rahma, Tri Inda Fadhila. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Pembangunan Financial Technology (Fintech)*, Jurnal At-Tawassuh ;Vol III, No.1, 2018 : 642 – 661.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya penyusunan, pengumpulan informasi ke dalam suatu matriks atau konfigurasi yang mudah dipahami. Konfigurasi semacam ini akan memudahkan dalam penarikan kesimpulan atau penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang dapat dipahami. Penyajian data yang sederhana dan mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data deskriptif kualitatif yang valid.

d. Ketergantungan (dependability)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Selanjutnya peneliti mencari arti dan penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu ke dalam suatu kesatuan yang mudah dipahami dan ditafsirkan dengan dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka penulis selalu berdiskusi dengan dosen pembimbing secara bertahap mengenai konsep yang dihasilkan di lapangan selama proses penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Asam Jawa

1. Kondisi Geografis

Desa Asam Jawa berada di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki luas daerah 6.600 Ha, dimana lahan di desa ini dibagi atas 5.800 Ha merupakan lahan perkebunan dan 800 Ha adalah pemukiman masyarakat, oleh karena itu desa asam Jawa terbagi atas 22 dusun didalamnya dan desa asam Jawa berada di ketinggian 750 mdpl.

Daerah yang ada di desa ini umumnya memiliki tanah yang datar dan hanya sedikit daerah yang tanahnya memiliki kemiringan. Suhu di desa Asam Jawa pada umumnya berkisar rata – rata $29^{\circ} - 33^{\circ} \text{C}$ yang merupakan suhu beriklim tropis, daerah ini dapat dikatakan memiliki suhu tropis yang cocok untuk ditanami komoditi kelapa sawit. Curah hujan yang ada di desa Asam Jawa ini berada pada kisaran 1000 – 1500 mm / thn, curah hujan yang dapat dikatakan tinggi ini sangat cocok untuk ditanami komoditi – komoditi perkebunan yang banyak menyerap air tanah.

Desa Asam Jawa dikelilingin daerah – daerah lain yang ada disekitarnya, daerah – daerah yang berbatasan langsung dengan desa ini yaitu :

- a. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Bunut
- b. Disebelah selatan berbatasan dengan Desa Pasit Tuntung
- c. Disebelah timur berbatasan dengan Desa Aek Batu
- d. Disebelah baratnya berbatasan dengan dengan kelurahan Kotapinang

Jika dilihat dari perbatasan – perbatasannya, desa Asam Jawa dikelilingin oleh desa – desa maupun ibukota kabupaten yang menunjang perkembangan desa tersebut. Jarak antara desa Asam

Jawa ke ibukota kecamatan Torgamba 11 km serta jarak ke ibukota kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu 30 km.

Sebelum adanya pemekaran di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, desa Asam Jawa merupakan desa yang tergabung dengan Kecamatan Kotapinang, dan merupakan desa yang terpencil dan dapat dikatakan terisolasi. Hal ini dikarenakan pada tahun 1980'an, di Kotapinang memiliki sungai yang bernama sungai barumun, dimana pada saat itu sungai ini belum memiliki jembatan yang dapat dilewati transportasi darat untuk dapat samapai ke desa Asam Jawa. Oleh karena itu, masyarakat pada masa sebelum adanya jembatan di sungai tersebut ketika hendak menyebrang dari kotapinang menuju desa Asam ataupun sebaliknya harus menyewa Panton sebagai alat transportasi.

Salah satu faktor yang mendukung berkembang pesatnya desa Asam Jawa ialah letak geografisnya yang sangat cocok untuk menanam komoditi kelapa sawit. Faktor-faktor yang mendukung dapat berkembang pesatnya komoditi kelapa sawit adalah kesesuaian lahan yang ditentukan oleh letak geografis, tofografi serta ketersediaan air yang banyak. Strategis serta suburnya tanah yang dimiliki desa Asam Jawa ini memberikan dampak yang besar bagi perkembangan desa Asam Jawa yang semula hanya terdiri dari hutan-hutan yang lebat dan sedikit penghuninya.

Selain sawit yang menjadi komoditas utama perkebunan di desa Asam Jawa, setidaknya ada beberapa komoditas lain yang dikembangkan didesa Asam Jawa tersebut, komoditas-komoditas itu ialah karet, kopi robusta, kakao, kelapa, serta pinang. Banyaknya komoditas tanaman perkebunan di desa Asam Jawa itu juga tidak terlepas dari faktor keadaan geografis dan iklim yang ada di desa Asam Jawa yang sangat cocok ditanami enam komoditas tersebut.

2. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Asam Jawa

Visi

Menjadikan masyarakat Desa Asam Jawa yang mandiri, sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing

Misi

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Desa Asam Jawa sesuai Potensi Daerah
- 2) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat
- 3) Membangun kualitas pendidikan, kesehatan, dan spritual masyarakat
- 4) Membangun seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan desa Asam Jawa
- 5) Meningkatkan kualitas fungsi dan peran ekonomi, sosial, budaya, dan beragama yang mandiri dan bermatabat

3. Struktur Penduduk

Desa Asam Jawa dengan jumlah penduduk 18,190 jiwa, yang terdiri dari laki – laki 9,343 jiwa, prempuan 8,847 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 4,734 KK dengan penganut agama Islam sebanyak 15, 694, Kristen sebanyak 2,323, Khatolik sebanyak 110, dan Budha sebanyak 62 orang.

Adapun Keadaan dan Jumlah penduduk sebagaimana tabel 4.1:

Tabel 4.1. Keadaan dan Jumlah Penduduk

NO	Nama Dusun	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Teluk Pinang	537	422	959
2	Kampung Beringin	363	378	741
3	Kampung Mangga	343	271	614

4	Asam Jawa Barat	468	529	997
5	Asam Jawa Timur	434	350	784
6	Bakti Aek Batu	421	540	961
7	Al'Amin Aek Batu	431	312	743
8	Cinta Makmur	357	288	645
9	Aek Batu Selatan	450	368	818
10	Aek Batu Utara	497	432	929
11	Aek Batu Timur	377	359	736
12	Milano	350	341	691
13	Herfinta	425	423	848
14	Tasik Rejo	325	359	684
15	Aek Torop Barat	428	418	846
16	Aer Torop Timur	466	457	923
17	Sumberjo I	469	430	899
18	Sumberjo II	472	453	925
19	Sumberjo III	435	447	882
20	Sumberjo IV	355	343	698
21	Sumberjo V	479	470	949
22	Sumberjo Pirbun	425	447	872
Jumlah		9.343	8.847	18.144

Sumber Data : RPJMD Desa Asam Jawa Tahun 2020

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki – laki lebih banyak yakni sebesar 9.434 orang dibandingkan jumlah penduduk perempuan yang hanya 8.847 orang

Adapun komposisi jumlah Kepala Keluarga sebagaimana tabel 4.2

Tabel 4.2 Komposisi Jumlah Kepala Keluarga (KK)

NO	Wilayah Desa Asam Jawa	Jumlah KK
1	Teluk Pinang	315
2	Kampung Beringin	115
3	Kampung Mangga	108
4	Asam Jawa Barat	322
5	Asam Jawa Timur	190
6	Bakti Aek Batu	245
7	Al'Amin Aek Batu	210
8	Cinta Makmur	172
9	Aek Batu Selatan	218
10	Aek Batu Utara	255
11	Aek Batu Timur	131
12	Milano	243
13	Herfinta	193
14	Tasik Rejo	247
15	Aek Torop Barat	189
16	Aer Torop Timur	230
17	Sumberjo I	239
18	Sumberjo II	207
19	Sumberjo III	226
20	Sumberjo IV	212
21	Sumberjo V	248
22	Sumberjo Pirbun	219
Jumlah		4.734

Sumber Data : RPJMD Desa Asam Jawa Tahun 2020

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah KK terbanyak yakni dari Dusun Asam Jawa Barat yakni 322 KK, dan jumlah KK paling sedikit yakni Dusun Kampung Mangga yakni 108 KK.

Mengingat sarana dan prasarana sangatlah diperlukan untuk menjaga segala aktifitas kehidupan, baik sarana dan prasarana dibidang pendidikan, sosial maupun bidang ekonomi. Mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Asam Jawa yang menunjukkan fasilitas untuk menunjang dan melengkapi kegiatan masyarakat sehari hari, adapun sarana dan prasarana untuk dapat dilihat pada tabel 4.3 :

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Desa Asam Jawa

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Paud / TK	20
2	SD	8
3	SMP	6
4	SMA	4
5	Perguruan Tinggi	1
6	PUSKESMAS	1
7	PUSTU	3
8	POSYANDU	11
9	KANTOR PEMERINTAHAN	1
10	AULA	1
Jumlah		56

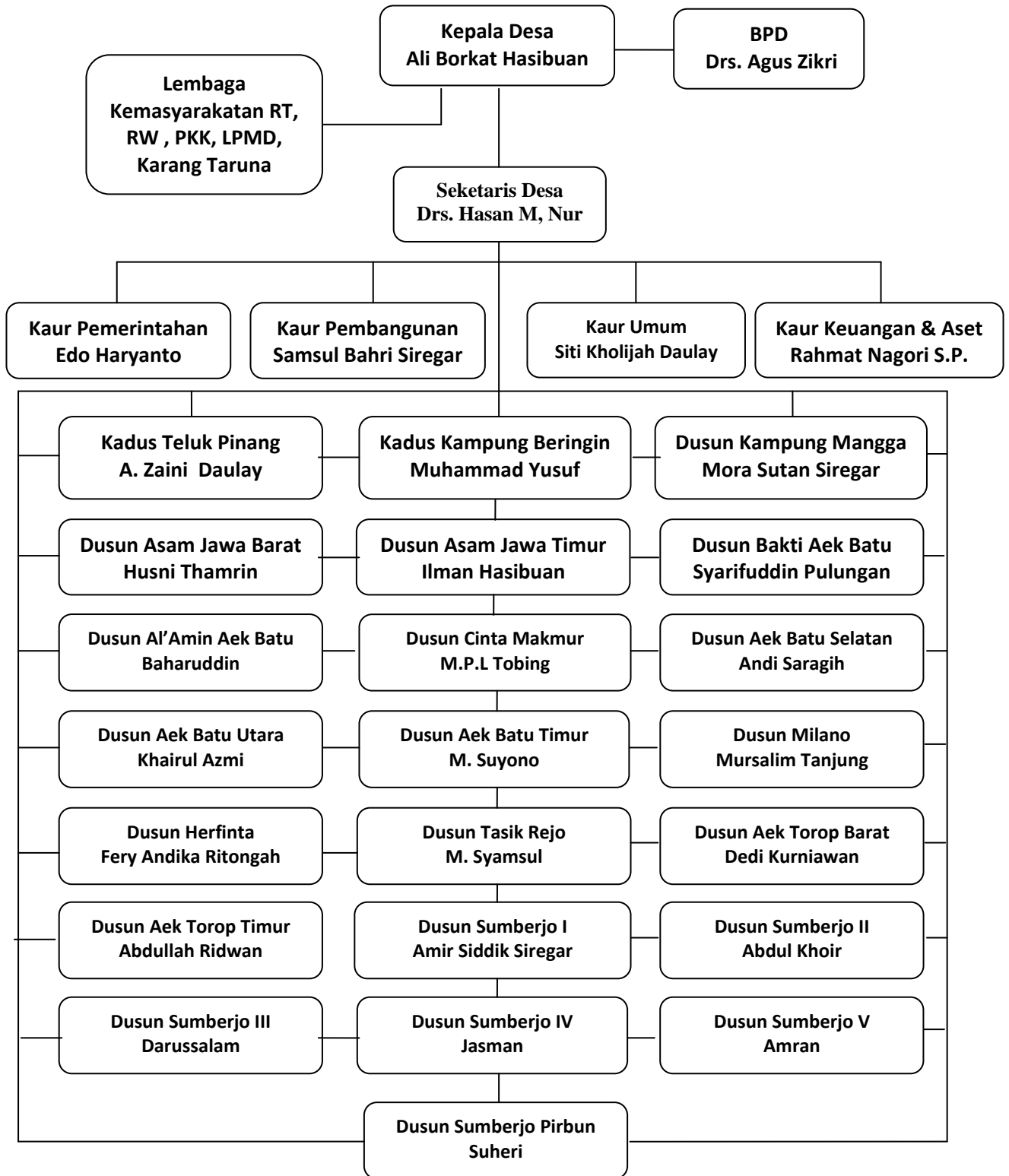
Sumber data : RPJMD Desa Asam Jawa Tahun 2020

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Asam Jawa

Struktur organisasi merupakan gambaran wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkup tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan memberikan kejelasan kepada setiap perangkat desa terkait dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme pertanggungjawabannya. Dengan adanya struktur pemerintahan ini sebagai pembagian tugas kepada semua perangkat daerah yang akan saling berkoordinasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba
Kabupaten Labuhanabtu Selatan



B. Hasil Penelitian

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan / Evaluasi Dalam Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan mengingat segala keterlibatan dalam perencanaan program pembangunan yang dikerjakan merupakan yang diusulkan oleh masyarakat Desa Asam Jawa, dalam hal ini pembuatan jalan baru adalah program usulan masrakat Desa Asam Jawa.

Oleh sebab itu penting bagaimana menumbuhkan partisipasi Non Fisik masyarakat yaitu berupa kehadiran dan menyalurkan aspirasi pemikiran terutama dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keikutsertaan ini adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini senada dengan wawancara oleh Kepala Desa Asam Jawa bahwa :

“pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa sebagian besar adalah hasil musrenbang yang telah dilaksana bersama masyarakat. Secara tidak langsung ide dan gagasan pembangunan awalnya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat Desa Asam Jawa, jadi mereka dalam hal ini masyarakat memang sudah turut berpartisipasi walaupun partisipasinya masih dikatakan kurang”¹⁰

Berdasaakan wawancara diatas bahwa pada dasarnya masyarakat sudah terlibat dalam pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dapat terlihat dengan adanya musrenbang di Desa Asam Jawa. Keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan oleh adanya keputusan dan keterlibatan masyarakat yang sangat dibutuhkan mengingat ide – ide atau pemikiran dapat

¹⁰ Ali Borkat Hasibuan, Hasil Wawancara Kepala Desa Asam Jawa, Tanggal 20 mei 2021

menjadi bahan pertimbangan. Pada tahap proses perencanaan inilah masyarakat Desa Asam Jawa mulai mempersiapkan rancangan – rancangan kedepan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini menjadi sangat penting karena proses dari perencanaan merupakan suatu prosedur yang secara umum dimaksudkan untuk membantu merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan.

Dalam proses perencanaan pembangunan khususnya pada pembuatan jalan baru di Desa Asam Jawa. Dalam hal ini infrastruktur merupakan akses yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dalam tahap perencanaan, sebelum diadakannya musrenbang terlebih dahulu di adakan forum musyawarah antar kepala dusun beserta aparat desa, dari musyawarah inilah mendapat beberapa masukan sebelum pada akhirnya di rapatkan dalam musyawarah rencana pembanguna desa. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala BPD:

“Sebelum kita melakukan yang namanya musrenbang terlebih dahulu di adakan yang namanya musdus atau musyawarah dusun. Dalam musyawarah dusun inilah kemudian saya bersama bapak Kepala Desa meminta sejumlah Kepala dusun untuk memaparkan hasil dari peninjua nya tentang apa yang kira-kira di butuhkan oleh masyarakat itu sendiri, dan tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada saja sebagian dari masyarakat yang tidak merasa puas, tetapi kami bersama jajaran Desa tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan dalam hal infrastruktur”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa dalam hal pembangunan tentunya tidak semua masyarakat nantinya akan merasa puas dengan apa yang sudah Pemerintahan Desa bersama

¹¹ Drs. Agus Zikri, Hasil Wawancara Oleh Ketua BPD, Tanggal 22 Mei 2021.

aparatnya jalankan. Akan tetapi Pemerintah beserta jajarannya berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kepuasan di dalam pembangunan terutama infrastruktur jalan. Dalam perencanaannya, aparat Pemerintah merasa bahwa belum maksimal dalam penyelenggaraannya. Masyarakat sudah dilibatkann awal dalam proses perencanaan tersebut akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada yang belum berpartisipasi dalam menyampaikan keinginannya akan kebutuhan pembangunan yang di inginkan. Hal tersebut senada dengan pernyataan oleh salah satu Toko Masyarakat di Desa Asam Jawa :

“Memang benar masih ada sebagian masyarakat yang belum secara menyeluruh menyampaikan keinginannya untuk pembangunan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi antara kepala desa dengan masyarakat yang mana turut memicu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Karena kurangnya komunikasi yang terjalin mengakibatkan sedikit pula informasi yang di dapatkan akan kebutuhan yang saat ini di inginkan oleh masyarakat Desa Asam Jawa”¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kurangnya komunikasi yang terjalin antara pihak dari Aparat Desa dalam hal ini oleh Kepala Desa Asam Jawa turut memicu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Padahal bentuk partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat merasa turut dilibatkan dalam hal pembangunan. Partisipatif masyarakat dalam hal kolsultasi yang kurang di rasakan oleh masyarakat Desa Asam Jawa seperti pada hasil wawancara oleh salah satu tokoh masyarakat. Kurangnya komunikasi yang terjalin antara Kepala Desa dan masyarakat Desa Asam Jawa mengakibatkan adanya

¹² Sopian Hermansyah, Hasil Wawancara Oleh Tokoh Masyarakat Desa Asam Jawa, Tanggal 23 Mei 2021

ketidakpuasan di tengah masyarakat, ditambah lagi pada proses musyawarah dusun hanya dihadiri oleh Pemerintah Desa beserta Kepala Dusun. Dalam musyawarah tersebut hal yang menjadi pembahasannya yaitu bagaimana merumuskan kebutuhan pembangunan di Desa Asam Jawa yang nantinya akan dirapatkan lebih lanjut dalam tahap Musrenbang. Salah satu kekurangan dari musdus tersebut yaitu kurangnya warga yang hadir pada saat rapat tersebut. Hal tersebut juga di kemukakan oleh kepala BPD :

“Salah satu kekurangan dari musyawarah dusun yang di lakukan beberapa tahun ini di Desa Asam Jawa yaitu tidak menyertakan warga dalam rapat tersebut, akan tetapi bukan berarti masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Sejumlah Kepala dusun diberikan tugas untuk mengumpulkan data informasi akan apa saja keinginan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Setelah mendapatkan informasi kemudian barulah kami beserta seluruh yang terlibat di dalamnya melakukan musyawarah. Akan tetapi kedepannya kami akan berusaha mengikut sertakan pula bukan hanya dalam hal ini Bapak Kepala Desa dan sejumlah kepala dusun , tetapi juga sebagian masyarakat Desa Asam Jawa agar terjadi keterbukaan satu sama lainnya”¹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam upaya pembangunan di Desa Asam Jawa, sebelum adanya tahap Musrenbang terlebih dahulu dilakukan musyawarah dusun. Hasil dari musyawarah dusun inilah yang kemudian dirapatkan dalam Musrenbang. Akan tetapi salah satu kelemahan dari musyawarah tersebut yaitu tidak adanya sama sekali warga yang hadir. Masyarakat memang sengaja tidak diundang karena dari tahun sebelumnya juga diberlakukan hal yang sama, selain itu juga Pemerintah Desa menganggap bahwa sudah dilakukan interaksi langsung ditengah masyarakat agar warga dapat menyampaikan

¹³ Drs. Agus Zikri, Hasil Wawancara Oleh Ketua BPD, Tanggal 22 Mei 2021.

kebutuhannya, jadi tidak perlu lagi untuk diikuti sertakan dalam musyawarah tersebut. Padahal apabila masyarakat juga dihadirkan dalam musyawarah tersebut maka akan semakin menguatkan landasan pemerintah Desa Asam Jawa dalam hal pembangunan, serta tidak menutup kemungkinan pada saat kepala dusun sedang melakukan wawancara di tengah masyarakat banyak pula yang tidak dapat berpartisipasi karena kesibukan di ladang. Jadi, saat dilakukan musyawarah dusun, masyarakat dapat berpartisipasi kembali baik itu memberikan saran atau menambah masukan sebelum di rapatkan pada proses Musrenbang.

Kegiatan perencanaan pada tahap musdus kemudian di bawa pada ketinggian musrenbang dan menghasilkan sejumlah rencana pembangunan. Dalam hal perbaikan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Desa Asam Jawa melakukan pembangunan pada infrastruktur jalan. Pembuatan jalan baru adalah salah satu upaya Pemerintah setempat dalam memudahkan masyarakat yang ingin melakukan aktivitasnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Masyarakat bersama Pemerintahan merupakan elemen penting dalam sebuah pembangunan yang sangat menunjang keberhasilan dari pembangunan itu sendiri serta masyarakat juga di berikan peran yang cukup sentral di dalam pembangunan agar kiranya masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahap ataupun proses pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah.

Keterlibatan dari anggota masyarakat dalam proses pembangunan mutlak adanya, karena tanpa itu maka program dari pembangunan yang dilaksanakan ataupun akan dilaksanakan nantinya tidak akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai

manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Dalam pelaksanaan pembangunan tentunya ada rangsangan dari Pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Hal tersebut senada disampaikan oleh Kepala Dusun Sumberjo Pasar I :

“Partisipasi masyarakat ada yang namanya kesadaran kolektif, tanpa dibayar mereka dengan suka rela membantu. Ada tiga faktor yg mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu adanya rasa memiliki, masyarakat di libatkan dalam proses pembangunan, dan yang terakhir memang masyarakat butuh. Jika dari ketiganya tidak ada maka jangan harap akan ada partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat pada dasarnya ada yang secara sadar sukarela turut berpartisipasi dalam pembangunan walaupun tanpa diberikan sejumlah upah. Terdapat 3 hal yang mendasari dari tingkat kemauan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, diantaranya yaitu harus ada rasa saling memiliki, yang kedua yaitu masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan yang ketiga yaitu memang secara umum masyarakat butuh. Untuk terjadinya proses pembaharuan yang continue atau berkesinambungan, maka perlu adanya kerja sama dan dukungan antara Pemerintah dan masyarakat dalam aspek dan segi pembangunan. Kerjasama yang diharapkan Pemerintah dari masyarakat adalah keikutsertaan dalam menyumbangkan kemampuannya berupa pemikiran, keterampilan, bahan material, dan terlebih lagi ialah masalah dana jika memang memungkinkan.

Terkait masalah pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa terdapat partisipasi masyarakat dalam bentuk materi / dana.

¹⁴ Amir Siddik Siregar, Hasil Wawancara Oleh Kadus Sumberjo Pasar I, Tanggal 26 Mei 2021.

Keterlibatan masyarakat Desa Asam Jawa dalam bentuk sumbangan uang adalah partisipasi anggota masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan uang untuk pembangunan.

Terkait masalah pembangunan dalam bentuk swadaya masyarakat berupa uang, terkhusus untuk masalah pembangunan pada hal ini pembuatan jalan baru yang ada di Desa Asam Jawa, terdapat pula berbagai macam swadaya yang di dapatkan. Walaupun memang pada awalnya ada sebagian masyarakat yang menolak dilakukan pembangunan jalan tersebut, mengingat bahwa tanah yang digunakan terdapat sebagian lahan oleh masyarakat yang menginginkan untuk di lakukan penggantian berupa uang. Hal ini senada dengan hasil wawancara oleh Bapak Kepala Desa Asam Jawa :

“Untuk masalah pembuatan jalan baru tersebut memang pada awalnya masyarakat Desa Asam Jawa sebagian menolak dilakukan pembangunan tersebut karena mereka menginginkan adanya penggantian berupa uang. Permasalahan yang ada dana yang ada hanya sebesar Rp.57.795.700. Jika dana tersebut di peruntuhkan untuk penggantian beberapa lahan masyarakat maka jelas tidak akan cukup. Akan tetapi kami beserta seluruh jajaran Desa terus berupaya bagaimana memberikan pemahaman mendasar untuk kepentingan dan kelancaran masyarakat itu sendiri”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur khususnya pada pembuatan jalan baru pada awalnya memang tidak begitu baik. Terjadi penolakan ditengah masyarakat Desa Asam Jawa atas kepemilikan lahan tersebut yang ingin diberikan penggantian berupa uang. Hal tersebut tentunya turut menjadi perhatian khusus utamanya oleh Bapak Kepala Desa Asam Jawa

¹⁵ Ali Borkat Hasibuan, Hasil Wawancara Kepala Desa Asam Jawa, Tanggal 20 mei 2021

dalam memberikan pemahaman bagi sejumlah masyarakat yang terkait. Pembuatan jalan baru yang berada di dusun Sumberjo Pasar III adalah hasil dari musrenbang pada tahun 2019 dan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa Asam Jawa tahun 2020. Walaupun ada sebagian masyarakat yang menolak tetapi jumlah yang menginginkan untuk di lakukan pembuatan tersebut lebih banyak sehingga saat ini telah dilakukan pembuatan jalan tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh seorang masyarakat Dusun Sumberjo Pasar II yaitu pak Syafi,i :

“Kami ini sebenarnya menginginkan jalan-jalan antar desa ada untuk mempermudah mobilitas kami kalau bisa diperbaiki seperti sekarang ini, Ya... meski ada beberapa masyarakat yang menolak karna tanah mereka dipakai untuk jalan baru tapi setelah ada mediasi dari masyarakat dan pemerintahan kepada warga yang terkena tanahnya untuk pembuatan jalan baru akhirnya merelakan tanah lahannya di pakai sedikit untuk pembuatan jalan baru karna masyarakat sekitar sangat membutuhkan itu untuk akses jalan yang lebih mudah walaupun masih batu kan sudah enak dan tidak becek lagi, kami ya... bersyukur Alhamdulillah karna sudah bagus walaupun masih banyak kekurangannya”¹⁶

Hal yang hampir serupa disampaikan pak mukidin selaku tokoh masyarakat dusun sumberjo pasar III :

“saya fikir untuk pelaksanaan kegiatan pembuatan jalan baru yang menyatukan dusun sumberjo pasar I, pasar II, dan III untuk hambatan atau kendala yang kita hadapi tidak terlalu signifikan mengingat hampir semua masyarakat ingin akses jalan mereka jadi lebih mudah dikarenakan apabila kondisi cuaca tidak baik atau hujan maka jalanan yang biasa di lalui menuju dusun sumberjo pasar III itu sangat licin dan membutuhkan jarak untuk

¹⁶ Syafi'i Herdiansyah, Hasil Wawancara Oleh Masyarakat Sumberjo Pasar II, Tanggal 28 Mei 2021.

memutar sehingga wajar saja jika banyak masyarakat yang menginginkan pembuatan jalan baru agar tidak menjadi hambatan menuju sumberjo pasar III, mungkin kendalanya cuma dilahan masyarakat yang terpakai untuk pembuatan jalan baru sehingga terjadi penolakan sebelumnya”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat dan aparatur Pemerintahan sudah bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan baru yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Desa khususnya dusun Sumberjo Pasar III, dengan melibatkan masyarakat Desa Asam Jawa sebagai pengawas dari pengerjaan pembuatan jalan baru tersebut.

Pemerintah Desa Asam Jawa memberikan pemahaman serta komunikasi yang cukup kepada masyarakat terkait sehingga pada akhirnya secara suka rela setuju tanah tersebut untuk pembuatan jalan baru, mengingat jalan tersebut bukan merupakan pembangunan yang besar. Jalan yang dibangun hanya memiliki luas 514 meter. Pendekatan secara kekeluargaan pun turut dilakukan oleh pihak dari Desa dalam memberikan pemahaman oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga pada akhirnya tidak terjadi lagi penolakan ditengah masyarakat.

c. Tahap Pengawasan / Evaluasi

Berbagai kegiatan hasil pembangunan yang telah terjadi di masyarakat dapat dilihat berhasil atau tidaknya apabila dalam penilaian orang banyak dianggap baik dan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kebijakan publik merupakan sikap dukungan yang positif terhadap pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dapat dilakukan dengan memantau hasil kebijakan publik dan pelaksanaannya.

¹⁷ Mukidin surejo, Hasil Wawancara Oleh Tokoh Masyarakat Sumberjo Pasar III, Tanggal 29 Mei 2021.

Pada tahap ini masyarakat harus bersikap kritis terhadap apa-apa yang sudah ditetapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa adanya pengawasan / evaluasi dari masyarakat bisa saja terjadi penyimpangan pada pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut Wirawan evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Dari definisi evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji informasi untuk menentukan alternatif dalam mengambil keputusan kebijakan dari keseluruhan program guna menyelesaikan masalah dan merencanakan kegiatan akan datang mengenai suatu objek evaluasi yang telah ditentukan.¹⁸

Sedangkan dalam upaya evaluasi atau pengawasan ada tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Dari tujuan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari evaluasi adalah untuk menilai dan melihat secara sistematis pencapaian target program yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan standart yang ditentukan agar dapat digunakan dalam mengambil keputusan mengenai program selanjutnya.¹⁹

Berkaitan dengan tujuan dari evaluasi, hal yang sangat penting dalam pembangunan yaitu adanya kesesuaian antara

¹⁸ Wirawan. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi* (Jakarta: Rajawali Pers. 2011) h.75

¹⁹ Arikunto, Suharsimi. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara. 2009). H. 43

perencanaan dan pelaksanaannya. Berdasarkan keputusan Kepala Desa Asam Jawa Nomor 9 tahun 2017 tentang penunjukkan tim pengelola kegiatan (TPK) Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menegaskan bahwa Tim pengelola kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1) TPK menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa meliputi :

a) Pengadaan barang atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) :

- TPK membeli barang / jasa kepada 1 penyedia barang / jasa
- Pembelian sebagaimana dimaksud pada point pertama dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa
- TPK melakukan negoisiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang atau jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- Penyedia barang atau jasa memberikan bukti transaksi berupa nota

b) Pengadaan barang atau jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) :

- Penyedia barang atau jasa menyampaikan penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampir daftar rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan,volume, dan satuan.

c) Pengadaan barang atau jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah) :

- TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang atau jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran.

- Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara ketua TPK dan penyedia barang/jasa yang sekurang-kurangnya meliputi ruang lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan, para pihak, jangka waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban, sanksi
- 2) Nilai pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati / walikota sesuai dengan kondisi wilayah masing – masing dan dalam batas kewajaran.

Berdasarkan surat keputusan diatas dijelaskan bahwa dalam pembuatan jalan baru tersebut dikelola oleh Tim Pengelola kegiatan (TPK). Sedangkan dalam bentuk evaluasinya diawasi langsung oleh BPD dan masyarakat. Sebagaimana di ketahui bahwa tugas dari BPD adalah :

- a) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b) Melaksanak pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d) Membentuk Panitia Pemilik Kepala Desa
- e) Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan memyalurkan aspirasi masyarakat.
- f) Memberi persetujuan pemberhentian sementara Perangkat Desa
- g) Menyusun tata tertib BPD

Dari ketujuh tugas BPD tersebut, berdasarkan poin kedua yang menjelaskan bahwa BPD berhak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.Hal tersebut berkaitan dengan bentuk pengawasan yang

dilakukan oleh BPD terhadap kegiatan pembuatan jalan baru di Desa Asam Jawa

Pada tahap kegiatan musyawarah, masyarakat Desa Asam Jawa tidak diikutkan dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut demikian terjadi karena Pemerintah Desa menganggap bahwa tidak perlu lagi untuk melibatkan masyarakat karena pada mulanya mereka sudah terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat sudah dimintai apa saja yang menjadi kebutuhannya dalam pembangunan infrastruktur. Jadi, musyawarah dusun tersebut hanya diikuti oleh sejumlah aparat Desa hingga sejumlah kepala dusun yang nantinya hasil dari musyawarah tersebut di bicarakan kembali dalam kegiatan musrenbang. Akan tetapi, kedepannya Pemerintah menginginkan agar masyarakat juga dapat terlibat dalam musyawarah tersebut karena kegiatan pembangunan bukan untuk beberapa kelompok saja tetapi untuk seluruh warga desa Asam Jawa. Tingkat partisipasi masyarakat untuk Desa Asam Jawa pada tahap pelaksanaan pembuatan jalan baru sudah terbilang baik. Partisipasi masyarakat diindikasikan sudah baik karena masyarakat pada awalnya turut bergotong royong membersihkan lahan yang akan digunakan, serta pembuatan jalan baru tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala BPD :

“Pembuatan jalan baru yang ada di dusun Sumberjo Pasar III mulai dari tahap persiapannya, hingga pada proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini berupa besarnya volume , material yang di pakai, hingga pada proses pengerjaannya sudah memenuhi syarat yang ada”²⁰

²⁰ Drs. Agus Zikri, Hasil Wawancara Oleh Ketua BPD, Tanggal 22 Mei 2021

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam pembuatan jalan baru yang ada di dusun Sumberjo Pasar III sudah sesuai dengan syarat yang telah di tentukan.Kesesuaian tersebut dapat dilihat mulai dari perencanaan besarnya volume seluas 514 meter, hingga pada bahan bangunan yang dipakai. Proses dari evaluasi tersebut melibatkan langsung masyarakat karena Pembangunan infrastruktur Desa harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam bentuk partisipasinya salah satunya dapat ditunjukkan dengan partisipasi aktif dalam bentuk evaluasi/pengawasan dalam pembangunan.Evaluasi dimaksudkan untuk menganalisis, menilai, dan melihat seberapa jauh target tersebut sudah tercapai. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Desa Asam Jawa :

“Setiap pembangunan yang sudah berjalan dan dilaksanakan kita selaku aparratur desa khususnya saya sendiri Kepala Desa Asam Jawa dan jajarannya selalu mengevaluasi apakah yang kita buat ini betul – betul sudah sejalan dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat serta apakah sudah bermanfaat bagi masyarakat , mengingat apabila kita tidak mengevaluasi maka akan tidak begitu berdampak untuk kedepannya karna dalam tahap pembangunan desa kita juga harus memikirkan jangka panjang setiap pembangunan yang telah kita lakukan, untuk sejauh ini kita selaku aparatour Desa Asam Jawa harus tetap konsissten sebagai fasilitator untuk kemajuan desa kita dengan bekerjasama dengan masyarakat”²¹

Dari hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa pemerintahan Desa Asam Jawa berperan sebagai fasilitator dimana dalam hal ini pihak pemerintahan desa melayani dan saling berkordinasi untuk menampung segala sesuatu yang diinginkan

²¹ Ali Borkat Hasibuan, Hasil Wawancara Kepala Desa Asam Jawa, Tanggal 20 mei 2021

masyarakat dalam pembangunan desa. Adapun tim pelaksana evaluasi dalam pembuatan jalan baru dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 4.4

Tim pelaksana Evaluasi Pembuatan Jalan Baru Desa Asam Jawa

NO	Nama	Jabatan	Pencapaian Kinerja
1	Drs. Agus Zikri	Kepala BPD	Baik
2	Hamid	Masyarakat	

Sumber Data : Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tingkat hasil evaluasi kategori baik. Pemeriksaan pembuatan jalan baru dilakukan pada tanggal 15 maret 2017. Setelah pemeriksaan akhir, tim pengelola kegiatan memberikan hasil dari pengawasan tersebut kepada Kepala Desa sebagai penanggung jawab selanjutnya.

2. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguna di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pemerintah desa sangat berperan penting sebagai perencanaan untuk mendesain dan membentuk interaksi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menuju sasaran yang ingin dicapai Pemerintahan Desa bersama masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan lembaga BPD maupun masyarakat desa agar terjadinya pembangunan yang bermanfaat dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat dalam mobilitas kegiatan sehari – hari. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Asam Jawa :

“Dalam pembangunan kami biasanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat khususnya Desa Asam Jawa yang

ingin berpartisipasi untuk pembangunan dapat membantu dalam bentuk uang maupun bahan material atau lainnya untuk melancarkan pembangunan. Namun kami tidak memaksakan dan hanya bersifat sukarela, hal ini karena kami tidak bisa mengharap sepenuhnya terhadap dana yang ada dari kabupaten untuk pembangunan desa”²²

Senada dengan pak Samsul Bahri Siregar Kaur Pembangunan Desa Asam Jawa :

“tugas kami dari pihak desa bagaimana masyarakat agar dapat andil dalam setiap kegiatan baik itu perencanaan, maupun pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dan berusaha menjalin komunikasi yang baik antara pihak desa dengan masyarakat desa, tidak cuma itu kami kami selalu berkordinasi juga menghimbau maupun mensosialisasikan kepada kepala dusun dan mengarahkan kepada masyarakat arah pembangunan agar kedepannya sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat desa itu sendiri”.²³

Dari kedua pendapat diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa berupaya salah satunya yaitu dengan menyampaikan kepada masyarakat apabila ada yang ingin berkontribusi dalam hal kegiatan pembangunan di Desa Asam Jawa disini juga terlihat bahwa disisi lain pemerintahan desa sendiri berupaya membimbing dan membina masyarakat untuk mengarahkan kegiatan pembangunan kedepannya, selain itu pak Samsul Bahri Siregar juga mengatakan

“kami berusaha bagaiman proses pembangunan pedesaan kedepannya agar menjadi lebih baik lagi supaya mempermudah aktivitas dan kebutuhan masyarakat dalam setiap kegiatan,karna sejauh ini pembangunan yang terjadi masih terus ditingkatkan dan diperluas oleh pemerintahan desa secara bertahap di setiap dusun”.²⁴

²² Ali Borkat Hasibuan, Hasil Wawancara Kepala Desa Asam Jawa, Tanggal 20 Mei 2021

²³ Samsul Bahri Siregar, Hasil Wawancara Kaur Pembangunan di Balai Desa Asam Jawa, Tanggal 25 Mei 2021

²⁴ Samsul Bahri Siregar, Hasil Wawancara Kaur Pembangunan di Balai Desa Asam Jawa, Tanggal 25 Mei 2021

Dari hasil wawancara dapat kita pahami bahwa upaya pemerintahan desa dalam mengembangkan desa tersebut dengan cara memperluas bangunan yang telah terlaksana dengan cara bertahap di setiap dusunnya. Seperti yang dikemukakan Bu Ade Ratna ketua perwiraan Perempuan dusun Sumberjo Pasar III :

“ alhamdulillah di dusun kami sendiri untuk pembangunan sudah terjadi biasanya pak kadus juga menghimbau ke kami juga ketika ada pembangunan disini untuk membantu para pekerja seperti menyediakan minuman atau makanan bergiliran di setiap rumah karna pembangunan yang dilakukan disini gotong royong dari masyarakat disini dek”²⁵

Dan senanda dengan Bu Maysarah selaku masyarakat Dusun Sumberjo Pasar III :

“di setiap pembangunan disini biasanya pak kadus memberitahukan kepada suami kami dek agar saling bantu yaa minta tolonglah gitu meluangkan waktu nya untuk berpartisipasi untuk pembangunan yang dikerjakan disini dek”²⁶

Namun dalam rangka pembangunan jalan baru di dusun Sumberjo Pasar III, peneliti menemukan masalah dari hasil wawancara dengan Pak Mukhlis selaku masyarakat yang terdampak lahannya terkena pembuatan jalan baru :

“saya sebenarnya tidak mau membebaskan lahan saya untuk pembuatan jalan baru asal diganti rugilah baru saya mau, karna kalau tidak di ganti rugi lahan saya berkurang, namun setelah 3 minggu kedepan para aparatatur desa bersama pak kadus serta perwakilan masyarakat bermusyawarah bersama saya untuk memohon di bebaskan untuk pembukaan jalan baru, meskipun saya memberikan lahan saya untuk membuat jalan baru dengan syarat pihak desa yang

²⁵ Ade Ratna, Hasil Wawancara Dengan Ketua Perwiraan Perempuan Sumberjo Pasar III Desa Asam Jawa, Tanggal 29 Mei 2021

²⁶ Maysarah, Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Dusun Sumberjo Pasar III, Tanggal 29 Mei 2021

*membuatkan surat baru untuk saya, dan karna masyarakat sini juga membutuhkan jalan baru untuk akses yang lebih mudah jadi saya merelakan lahan saya dibuat untuk pembuatan jalan baru meskipun saya tidak begitu puas dengan hasilnya”.*²⁷

Senada dengan Pak Razman Daulay salah satu warga yang terdampak lahannya dipakai untuk pembuatan jalan baru :

*“saya merasa ketika lahan kami dipakai untuk jalan baru saya sangat kecewa karna tidak adanya ganti rugi dari pihak desa saya berharap setidaknya diberi uang ganti rugi untuk menghargai lahan kami yang dipakai,tapi setelah diberi pemahaman ke saya dari masyarakat sekitar dan dari pihak desa saya mau tidak mau harus merelakan lahan saya untuk pembuatan jalan baru”.*²⁸

Dari pernyataan diatas kita dapat ketahui bahwa pemerintah masih terus berusaha memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dari masyarakat untuk membangun desa meski ada sebagian orang yang merasa belum puas meski niat pemerintahan baik. Dan dari disini kita dapat lihat bahwa, rata – rata masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desa mereka meski ada sebagian masyarakat belum merasa puas akan kinerja Pemerintahan Desa.

²⁷ Muhklis, Hasil Wawancara Dengan Warga Pemilik Lahan Dusun Sumberjo Pasar III, Tanggal 3 Juni 2021

²⁸ Razman Daulay, Hasil Wawancara Dengan Warga Pemilik Dusun Sumberjo Pasar III, Tanggal 3 Juni 2021

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pembangunan yang telah terjadi sebenarnya tidak hanya usaha dari pemerintah semata maupun masyarakat saja, akan tetapi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama – sama yang nanti hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan yang terjadi di Desa Asam Jawa merupakan cermin dari berhasilnya pembangunan nasional, karena titik berat pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan Desa. Apabila pembangunan tersebut dilakukan di wilayah Pedesaan, maka sangat jelas bahwa partisipasi masyarakat Pedesaanlah yang menjadi juruh kunci keberhasilannya. Namun demikian, peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan yaitu berupa faktor penghambat maupun faktor pendukung :

A. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Asam Jawa

Munculnya partisipasi merupakan ekspresi dari perilaku manusia itu sendiri untuk melakukan tindakan dan terlibat dalam suatu kegiatan. Pelaksanaan pembangunan terjadi karena didorong oleh faktor utama yang mendukung, salah satunya adalah kemauan. Kemauan dari dalam masyarakat itulah yang sebenarnya mendorong seseorang untuk dapat terlibat didalam suatu kegiatan pembangunan apalagi kegiatan pembangunan tersebut merupakan kebutuhan dan menjadi prioritas mereka sebagai masyarakat setempat. Sehingga mereka tergerak untuk terlibat didalam kegiatan pembangunan tersebut. Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan tidak hanya timbul begitu saja akan tetapi karena ada yang mendorongnya untuk turut berpartisipasi.

Dalam menumbuhkan semangat untuk melakukan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, selain adanya unsur kemauan, salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu adanya sumbangan dan dukungan dari masyarakat itu sendiri untuk terlibat langsung dalam pencapaian tujuan dan keberadaan pembangunan itu sendiri. Adapun beberapa faktornya yaitu sebagai berikut :

a) **Sumbangan dan dukungan masyarakat**

Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pembangunan tanpa didorong oleh dana yang memadai prosesnya akan pincang dan hal ini merupakan fenomena umum yang sering dialami di setiap daerah tak terkecuali di Desa Asam Jawa.

Untuk menumbuhkan semangat dalam melakukan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, selain dibutuhkan adanya berupa sumbangan dana, dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah Desa turut serta diperlukan dalam pembangunan. Oleh karena itu, keseluruhan unsur tersebut terlibat secara langsung dalam pencapaian tujuan dan keberadaan pembangunan itu sendiri Dusseldrop, mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga Negara masyarakat berupa :

- a. Menjadi anggota kelompok – kelompok masyarakat.
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- c. Melibatkan diri pada kegiatan organisasi – organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain.
- d. Sumber daya masyarakat
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.

- f. Memanfaatkan hasil – hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.²⁹

Sejalan dengan teori diatas, salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat yaitu berupa sumber daya masyarakat. Hal tersebut begitu penting karna masyarakat merupakan kunci utama dalam setiap pembangunan. Berhasil atau tidaknya pembangunan salah satunya ditentukan dari keikutsertaan masyarakat itu sendiri. Adanya pembuatan jalan diharapkan salah satu alternatif masyarakat dalam mempermudah jarak tempuh atau dalam hal ini merupakan jalan pintas.

Senada dengan pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Syamsuddin seorang pemilik lahan bahwa :

” Memang benar lahan yang digunakan dalam pembuatan jalan baru tersebut diberikan secara suka rela. Saya pribadi juga nantinya ak"an turut merasakan dampak dari pembuatan jalan tersebut mengingat ada juga lokasi lahan sawit saya yang apabila pembuatan infrastruktur tersebut dapat diselesaikan maka akan sedikit mempermudah waktu tempuh saya. Walaupun memang perbandingan jarak tempuhnya tidak seberapa tapi akan lebih meringankan ”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh salah satu pemilik lahan yang digunakan dalam pembuatan jalan baru bahwa secara pribadi masyarakat tersebut dengan suka rela digunakan lahannya untuk pembangunan jalan di Desa Asam Jawa. Hal tersebut tentu tidak lepas dari adanya tingkat kesadaran masyarakat Desa Asam Jawa itu sendiri. Salah satu dukungan masyarakat Desa Asam Jawa

²⁹ Aprillia Theresia, Krishna dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung : Alfabeta, 2015) h. 200

³⁰ Syamsuddin, Hasil Wawancara Dengan Warga Pemilik Lahan Dusun Sumberjo Pasar III, Tanggal 5 Juni 2021

itu sendiri adalah dengan memberikan lahan mereka untuk pembuatan jalan, walaupun lahan yang diberikan dari masyarakat tidak begitu banyak. Tapi kita dapat melihat bahwa salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah adanya sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif karna logika sederrhana saja apabila pelepasan tanah jika bukan atas sumbangan dan dukungan secara suka rela pemiliknya, maka menjadi hal yang sangat kompleks dan rumit untuk bisa diselesaikan.

b) Faktor Kesadaran atau Kemauan

Keikutsertaan dalam suatu proses pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karna ada yang mendorongnya untuk berpartisipasi, salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.

Proses dari pembangunan di Desa tidak hanya membutuhkan tanggung jawab bersama akan tetapi dibutuhkan faktor kemauan untuk ikut langsung menyelesaikan pembangunan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga Desa Asam Jawa. Dalam pembuatan jalan baru di dusun Sumberjo Pasar III, kesadaran atau tingkat kemauan masyarakat setempat untuk mendukung pembangunan tersebut terbilang sudah baik. Salah satu bukti bahwa adanya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi yaitu dengan membebaskan lahannya.

Terjadinya suatu pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa tidak terlepas dari campur tangan dari masyarakat itu sendiri. Pembangunan Infrastruktur yang baik turut memicu

lajunya pertumbuhan ekonomi utamanya bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai petani.

Terkait masalah pembuatan jalan baru yang ada di dusun Sumberjo Pasar III, berbagai tingkat partisipasi masyarakat muncul dalam pembuatan jalan tersebut. Dalam hal ini partisipasi yang ada berupa tenaga. Bagi kaum pria yang merasa tidak berkecukupan mereka dengan suka rela bergotong royong membersihkan lahan yang akan digunakan untuk pembuatan jalan baru tersebut, walaupun masyarakat yang ada tidak seberapa. Sedangkan, bagi kaum perempuan mereka disibukkan dengan menyediakan berbagai olahan masakan seperti kue dan teh hangat. Hal tersebut merupakan tingkat kemauan masyarakat dengan sukarela berpartisipasi dalam pembuatan jalan baru. Tanah tersebut awalnya hanya berupa hutan yang di kelilingi oleh sejumlah lahan perkebunan sawit masyarakat. Hal ini lah yang juga menjadi salah satu alasan mengapa perlu dilakukan pembuatan jalan baru.

Adanya kesadaran atau kemauan masyarakat Desa Asam Jawa dalam pembuatan jalan baru juga salah satunya terlihat dari sikap masyarakat yang pada awalnya tidak begitu merespon pembangunan jalan tersebut. Akan tetapi dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa melalui pendekatan kekeluargaan maka perlahan kemauan untuk terlibat dalam pembuatan jalan tersebut mulai mendapat respon yang baik di tengah masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya pembuatan jalan baru seperti : Mempermudah pengangkutan hasil bumi, sebagai jalan pintas bagi anak sekolahan mengingat jalan tersebut merupakan jalan strategis untuk kesekolah, serta Masyarakat yang pada awalnya harus berputar sekitar 3 km untuk keladang kini dimudahkan dengan

jalan tersebut. Dengan adanya dampak tersebut, masyarakat sekitar merasa bahwa ada kemudahan dari akses jalan tersebut.

B. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Asam Jawa

Pentingnya kesadaran serta tanggung jawab sebagai manusia yang hidup ditengah masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasinya terkhusus dalam bidang pembangunan. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, dana Desa juga dapat menjadi faktor yang mampu mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

a) Faktor Adanya Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Dana Desa, menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab dari kurangnya

tingkat partisipasi masyarakat di Desa Asam Jawa. Sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan adanya dana Desa maka secara umum partisipasi masyarakat tidak begitu dibutuhkan lagi.

Hal ini senada dikemukakan oleh Pak edi sucipto salah satu masyarakat Desa Asam Jawa:

*“Secara umum dana Desa kan memang di peruntukkan untuk berbagai pembangunan yang ada di Desa. Jadi wajar kalau partisipasi sebagian masyarakat disini juga bervariasi karena adanya pemikiran bahwa dana tersebut dapat menutupi segala pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa”.*³¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat Desa Asam Jawa sebagian menganggap bahwa dana yang ada untuk Desa dapat menutupi dan membiayai segala keperluan dalam pembangunan yang ada di Desa. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Desa. Padahal, dana Desa merupakan salah satu penggerak terjadinya pertumbuhan pembangunan di Desa. Pemerintah sebagai penyelenggara dari pembangunan tersebut harus memusatkan subyek pembangunan berdasarkan kebutuhan oleh masyarakat Desa Asam Jawa. Akan tetapi, sebagai pelaksana kegiatan tentunya mempunyai tantangan dalam proses pembangunan. Hal ini senada dikemukakan oleh kepala BPD :

*“Tantangan terbesar saat ini khususnya untuk seluruh aparat Pemerintah Desa yaitu bagaimana meyakinkan masyarakat nya agar dapat terus ikut andil dalam sejumlah pembangunan yang ada di Desa, mulai dari perencanaannya hingga pada proses pengawasannya tanpa memikirkan adanya bantuan dana dari Daerah ataupun dari provinsi”.*³²

³¹ Edi Sucipto, Hasil Wawancara Oleh Masyarakat Sumberjo Pasar II, Tanggal 5 Juni 2021.

³² Drs. Agus Zikri, Hasil Wawancara Oleh Ketua BPD, Tanggal 22 Mei 2021

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Asam Desa bahwa:

“Harus diakui bahwa masih terdapat sebagian warga desa kami yang meskipun telah diajak langsung dan telah disosialisasikan untuk ikut berpartisipasi namun mereka tetap lebih memilih untuk bekerja di ladang mereka dan ada juga yang mengatakan bahwa anggaran setiap pembangunan dari pemerintah sudah ada (dana Desa)”.³³

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa dana Desa yang awalnya diberikan demi untuk kelancaran pembangunan serta diharapkan dapat memberdayakan masyarakat Desa ternyata tidak begitu berdampak positif ditengah masyarakat Desa Asam Jawa. Terdapat sebagian dari masyarakat yang meskipun diajak langsung untuk ikut berpartisipasi namun mereka lebih memilih untuk bekerja diladang mereka karena anggapan bahwa Pemerintah sudah mempunyai dana Desa. Jadi dalam pembuatan jalan baru tersebut awalnya sedikit terkendala karena kurangnya biaya material dan juga faktor penghambat lainnya karena ada sebagian masyarakat yang tidak ingin berkontribusi dalam bentuk tenaga maupun materi.

Adanya Dana Desa turut berdampak positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di Pedesaan khususnya Desa Asam Jawa. Sedangkan, dampak negatif dari adanya dana Desa yaitu mengurangi tingkat gotong royong masyarakat. Hal tersebut senada dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Asam Jawa :

“sifat gotong royong.Akan tetapi hal tersebut justru sudah mulai hilang di tengah masyarakat Desa Asam Jawa. Sebelum adanya dana Desa masyarakat setiap hari jumat rutin

³³ Ali Borkat Hasibuan, Hasil Wawancara Kepala Desa Asam Jawa, Tanggal 20 Mei 2021

*melakukan gotong royong .Sedangkan, setelah adanya bantuan dana Desa masyarakat sudah acuh terhadap pembangunan yang ada. Misalnya saja sebelum ada yang namanya pembuatan talud atau pun drainase, Desa Asam Jawa tidak pernah mengalami bencana banjir. Akan tetapi mengapa pada saat adanya dana Desa justru malah memunculkan bencana banjir di tengah pemukiman warga. Hal tersebut terjadi tentunya karena sebelum adanya pembangunan drainase masyarakat secara rutin membersihkan selokan mereka masing-masing. Tetapi setelah adanya perbaikan selokan tersebut (drainase), rasa gotong royong masyarakat Desa Asam Jawa sudah berkurang“.*³⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas sifat gotong royong masyarakat Desa Asam Jawa mulai berkurang. Hal tersebut salah satunya dampak dari adanya Dana Desa. Jika kita berbicara masa lalu, mudah sekali menemukan budaya gotong royong dalam berbagai bentuk. Mulai dari kerja bakti yang seringkali dilakukan warga masyarakat setiap satu minggu sekali hingga budaya gotong royong antar umat beragama. Selain itu partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga yang mulai memudar akibat dampak dari adanya dana Desa seperti membersihkan saluran air, perbaikan jalan, membersihkan kantor Kecamatan, serta kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung dari masyarakat. Padahal, budaya gotong royong adalah identitas nasional. Karenanya budaya gotong royong seharusnya terus dijaga supaya terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebaliknya dengan adanya dana Desa justru mengurangi partisipasi masyarakat Desa Asam Jawa dalam Pembangunan.

³⁴ Mukidin surejo, Hasil Wawancara Oleh Tokoh Masyarakat Sumberjo Pasar III, Tanggal 29 Mei 2021.

b) Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan cerminan keadaan penduduk suatu desa yang dapat mempengaruhi terhadap daya pandang dan berdampak pada perilaku/cara membangun suatu desa. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di muka bumi ini adalah karena faktor pendidikan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, sedangkan bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah biasanya mempunyai perhatian yang rendah pula dalam proses pembangunan.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Asam Jawa menjadi kendala bagi pencapaian program pembangunan. Pengembangan pola pikir masyarakat sangat terbatas terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, misalnya penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan, tata cara pelaksanaan pembangunan partisipatif dan lainnya, daya serap masyarakat sangat lemah sehingga hasil dari penyuluhan tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa Asam Jawa salah satunya berdampak pada kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat di bidang pembangunan jalan desa. Senada dengan pernyataan di atas di sampaikan berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Desa Asam Jawa :

“Terhusus untuk masyarakat Desa Asam Jawa memang tingkat pendidikan yang masih relatif rendah turut menjadikan salah satu faktor penghambat bagi pembuatan jalan baru tersebut. Mengapa demikian karena masyarakat yang memang

*kurang pengetahuannya tidak begitu aktif dalam pembangunan tersebut, tetapi berbanding bagi masyarakat yang memang memiliki pendidikan yang cukup maka dapat berkontribusi lebih banyak lagi”.*³⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jika tingkat pendidikan seseorang lebih cukup maka kontribusinya terhadap pembangunan juga akan lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Oleh karena itu masalah pendidikan sangat berpengaruh besar dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan, seperti hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Dusun Sumberjo Pasar III desa Asam Jawa Bapak Mukidin Surejo mengenai faktor pendidikan berpengaruh dalam pembangunan desa sebagai berikut:

*“yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa ialah tingkat pendidikan masyarakat desa disini, karna kurangnya memahami tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam aspek pembangunan, yang menjadikan masyarakat itu sendiri menjadi kurang peduli tentang partisipasi tersebut sehingga perlu adanya kesadarannya yang harus dirangsang dalam kegiatan partisipasinya dalam pembangunan tersebut oleh pemerintahan Desa Asam Jawa”.*³⁶

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Drs. Hasan M, Nur Seketaris Desa Asam Jawa terkait faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan :

“sebenarnya dari segi aspek sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kami rasa kami sudah berupaya untuk menyampaikannya namu masih

³⁵ Ali Borkat Hasibuan, Hasil Wawancara Kepala Desa Asam Jawa, Tanggal 20 Mei 2021

³⁶ Mukidin surejo, Hasil Wawancara Oleh Tokoh Masyarakat Sumberjo Pasar III, Tanggal 29 Mei 2021.

menjadi penghambat dalam penyampaian karena tingkat pendidikan masyarakat disini masih relatif rendah sehingga kami harus berusaha ekstra memberikan pemahaman – pemahaman yang membuat masyarakat itu mau berpartisipasi secara sukarela yang membuat mereka tidak dirugikan juga sehingga nantinya di harapkan terjalin hubungan yang harmonis antara pihak pemerintahan desa dengan masyarakat desa itu sendiri serta memberi pemahaman bahwa masyarakat itu sendiri dalam partisipasinya sangat diperlukan untuk pembangunan yang ada di desa ini”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Desa Asam Jawa bersama tokoh masyarakat berupaya agar membuat masyarakat aktif berpartisipasi dalam pembangunan mengingat kendala di masyarakat karena faktor pendidikan yang relatif rendah membuat masyarakat tidak begitu peduli sehingga peran pemerintahan Desa Asam Jawa harus memberikan pemahaman yang ekstra untuk membuat masyarakat Desa Asam Jawa dapat memahami serta mau berpartisipasi secara sukarela untuk pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa.

C. Pembahasan

Berdasar dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan membahas mengenai :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan / evaluasi dalam pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan / evaluasi dalam pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang dilakukan masyarakat desa Asam Jawa berdampak positif terhadap pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa. Hal ini terjadi di karenakan masyarakat Desa Asam Jawa mau dengan sukarela berpartisipasi untuk pembangunan jalan yang ada di Desa Asam Jawa. Hal ini nantinya juga akan memberikan harapan baru kedepannya bagi masyarakat Desa Asam Jawa karena dengan adanya partisipasi baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan / evaluasi dari masyarakat tersebut, maka akan memperoleh peluang untuk mendapatkan hasil pembangunan Desa yang lebih baik yang dapat menunjang berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya maupun politik. Dalam artian lebih menjamin kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas taraf kehidupan sehingga membuat pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa dapat dimanfaatkan kedepannya dengan maksimal dan semakin membaik.

Hal tersebut dijelaskan dalam teori pembangunan. Pembangunan bertujuan sebagai sebuah proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau meningkatkan kualitas suatu keadaan menjadi kualitas yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan

kemakmuran semakin tinggi.³⁷ Dengan adanya partisipasi masyarakat desa yang tinggi dalam pembangunan menyebabkan akses dan mobilitas masyarakat Desa Asam Jawa semakin membaik khususnya masyarakat dusun Sumberjo Pasar I, II, dan III sehingga pembangunan yang terjadi berdampak pada kegiatan masyarakat tersebut. Hal ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuddin yang berjudul : “ Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa” Pada tahun 2018, yang mana penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan desa di Desa Tanah Karaeng tergolong pada kategori tinggi yang dibuktikan oleh skor gabungan bidang - bidang partisipasi rata-rata 77.3 persen, hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tanah Karaeng tergolong tinggi yang berdampak pada pembangunan desa.³⁸

Kemudian hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan berdampak pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasa / evaluasi

a. Perencanaan

Perencanaan dalam pembangunan merupakan salah satu indikator yang berpengaruh dan perencanaan tersebut haruslah disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai agar nantinya yang dilaksanakan benar – benar terwujud dengan baik. Tidak hanya itu perencanaan sendiri memiliki peran yang penting terhadap pembangunan kedepannya sehingga dengan adanya perencanaan menjadi tolak ukur arah pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur Desa yang ada di Desa Asam Jawa bahwa masyarakat Desa Asam Jawa sebenarnya

³⁷ Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner* (Medan : Perdana Publishing, 2018), h. 3

³⁸ Wahyuddin, “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ALAUDDIN Makasar, 2018), h.9

sudah terlibat dalam partisipasi pada tahap perencanaan pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa. Salah satunya masyarakat terlibat dalam perencanaan yaitu masyarakat mengikuti Musyawarah Dusun (musdus) partisipasi masyarakat dapat terlihat juga dengan adanya musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di Desa Asam Jawa. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diharapkan keberhasilan pembangunan akan menjadi lebih baik karena tidak dapat dilepaskan bahwa adanya keputusan dan keterlibatan masyarakat yang sangat mempengaruhi pertimbangan arah pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian untuk tujuan pembangunan.

Seperti halnya pada teori perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan adalah pembangunan yang diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan), dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan penyusunan program perencanaan pembangunan secara terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan secara efektif dan efisien, yang berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilakukan secara optimal.³⁹

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa secara umum Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan untuk itu perlu adanya kerja sama antara kedua elemen tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan tentunya harus ada rangsangan dari Pemerintah agar mempengaruhi

³⁹Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Desa Partisipatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), Cetakan Pertama, h.34

masyarakat supaya mau ikut, serta memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, Dalam Undang – Undang No 25 tahun 2004 yaitu masyarakat bersama Pemerintah merupakan stakeholder dalam sebuah pembangunan. Pembangunan dengan demikian menjadi lebih jelas nantinya, barang siapa yang mempunyai produktif, maka ia telah nyata berpartisipasi secara nyata dan aktif dalam pembangunan.⁴⁰

Berdasarkan wawancara pada temuan penelitian dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa, masyarakat Desa Asam Jawa pada dasarnya ada yang secara sadar sukarela turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan walaupun tanpa diberikan sejumlah upah. Hal ini menimbulkan dampak positif yang mampu menggerakkan masyarakat untuk bekerjasama dengan Pemerintahan Desa sehingga memunculkan adanya yang pertama rasa saling memiliki, yang kedua masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan, dan yang ketiga yaitu masyarakat memang secara umum membutuhkan pembangunan jalan tersebut. Akan tetapi bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur khususnya pada pembuatan jalan baru pada awalnya memang sempat tidak begitu baik. Terjadi penolakan ditengah masyarakat Desa Asam Jawa atas kepemilikan lahan tersebut yang ingin digunakan agar diberikan penggantian berupa uang. Namun semua dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan baru yang bertujuan untuk memudahkan akses dan mobilitas masyarakat Desa Asam Jawa khususnya Dusun sumberjo Pasar III yang menandakan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan sudah tercipta di Desa Asam Jawa.

⁴⁰Nur Laily Oktafia, *“Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Pembangunan Tambak Udang Buatan Di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura”*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h.63

c. Pengawasan / Evaluasi

Partisipasi dalam pengawasan / evaluasi ini sangat berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.⁴¹ Dengan adanya pengawasan diharapkan kedepannya untuk mengetahui pencapaian program yang telah dilaksanakan, selanjutnya, hasil pengawasan atau evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar tolak ukur kedepannya untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya pengawasan kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa sudah memiliki pengawasan maupun evaluasi yang diawasi langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Karena pembangunan yang ada di Desa didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, jadi dalam bentuk partisipasinya salah satunya dapat ditunjukkan dengan partisipasi aktif masyarakat tersebut melalui evaluasi/pengawasan khususnya dalam pembangunan jalan baru yang ada di Dusun Sumberjo Pasar III., setelah dilakukan pemeriksaan akhir oleh BPD dan masyarakat, hal yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang di tunjuk masyarakat dan BPD memberikan hasil dari pengawasan tersebut kepada Kepala Desa sebagai penanggung jawab selanjutnya untuk menganalisis, menilai, dan melihat seberapa jauh target tersebut sudah tercapai.

⁴¹Tjahja Supriatna, *Prinsip – Prinsip Pembangunan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h, 26

2. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembanguana di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Peram pemerintah desa mempunyai kewenangan dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku pelayan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pemerintahan Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat Desa Asam Jawa, peran pemerintah sangatlah penting guna meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang nantinya dapat mengubah struktur pembangunan kearah yang lebih baik, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan prekonomian nantinya dari arah pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian pemerintahan desa memiliki tugas yang fungsi nya penting baik itu sebagai fasilitator, merencanakan, mengkordinasikan, mengontrol, pelaksanaan kegiatan, dan penyelenggaraan urusan pembangunan dengan pemerintahan daerah, semua itu harus tetap saling berkordinasi dan terus menjalin kerjasama agar dapat mencapai tujuan.

Adapun upaya maupun strategi yang dilakukan pemerintah desa agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di desa yaitu seperti melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan baik pelaksanaan, perencanaannya bahkan pengawasannya agar menumbuhkan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya usaha – usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial maupun ekonomi. Tidak hanya itu pemerintahan desa juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat termasuklah mengarahkan pendistribusian pembangunan secara merata terhadap

setiap dusun. Dalam Ekonomi Islam distribusi menjadi penting karena distribusi menjadi media untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.⁴²

adapun bentuk pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu apabila masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan maka aparat pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya yang diharapkan nantinya adanya responsive terhadap pemerintah menjadi lebih baik terkait arahan dari pemerintahan desa terhadap partisipasi terkait pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa.

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a. Faktor Pendukung

Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan digolongkan menjadi dua, yaitu : faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung adalah suatu hal yang dapat berperan penting dalam suatu proses yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas ataupun motivasi dalam melakukan suatu hal.⁴³

Faktor pendukung yang ditemukan peneliti dalam partisipasi pembangunan di Desa Asam Jawa yaitu :

1) Sumbangan dan Dukungan Masyarakat

Dukungan maupun sumbangan yang kuat dari masyarakat terhadap pemerintah Desa baik itu sumbangan tenaga, pikiran, maupun materi serta dukungan masyarakat yang berupa mendukung program pembangunan yang ada di Desa Asam

⁴²Azhari Akmal Tarigan, “*Tafsir Ayat –Ayat Ekonomi*”, (Medan : Febi UIN – SU Press, 2016), h.171

⁴³ Bolus Aritonang, “*Faktor Pendorong dan Penghambat Pertanian kopi Di Desa Aekraja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara*” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018) h,60

Jawa turut serta diperlukan dalam pembangunan. Oleh karena itu, keseluruhan unsur tersebut terlibat secara langsung dalam pencapaian tujuan dan keberadaan pembangunan itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk sumbangan dan dukungan yang dilakukan masyarakat yang di temui peneliti yaitu salah satu lahan yang digunakan dalam pembuatan jalan baru yang dimiliki masyarakat bahwa secara pribadi masyarakat tersebut dengan suka rela digunakan lahannya untuk pembangunan jalan yang ada di Desa Asam Jawa karna logika sederrhana saja apabila pelepasan tanah jika bukan atas sumbangan dan dukungan secara suka rela pemiliknya, maka menjadi hal yang sangat rumit untuk bisa diselesaikan pembangunan tersebut.

2) Faktor Kesadaran dan Kemauan

Pentingnya kesadaran dan kemauan untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan menjadi kunci sukses untuk mendukung pembangunan. Berkat adanya kesadaran atau kemauan dari masyarakat Desa Asam Jawa dalam pembuatan jalan baru juga salah satunya terlihat dari sikap masyarakat yang pada awalnya tidak begitu merespon pembangunan jalan tersebut namun dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa melalui pendekatan kekeluargaan dan kelapangan dada serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembanguna maka perlahan kemauan untuk terlibat dalam pembuatan jalan tersebut mulai mendapat respon yang baik di tengah masyarakat karena dengan adanya dampak pembangunan jalan tersebut, masyarakat sekitar merasa bahwa ada kemudahan dari akses jalan tersebut untuk kegiatan sehari – hari masyarakat.

b. Faktor Penghambat

Dalam usaha pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa pastinya mempunyai banyak masalah ataupun kendala yang dihadapi oleh pemerintahan desa yang mempengaruhi arah dan pergerakan pembangunan kedepan nantinya, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasinya terkhusus dalam bidang pembangunan. Faktor – faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu :

1) Faktor Adanya Dana Desa

Adanya Dana Desa menjadi menjadi salah satu faktor penghambat dari partisipasi masyarakat sebab masyarakat Desa Asam Jawa sebagian menganggap bahwa dengan adanya dana untuk Desa dapat menutupi dan membiayai segala keperluan dalam pembangunan yang ada di Desa. Namun Dana Desa ternyata tidak begitu berdampak positif ditengah masyarakat Desa Asam Jawa sebab sebagian dari masyarakat yang meskipun diajak langsung untuk ikut berpartisipasi namun mereka lebih memilih untuk bekerja diladang mereka karena menganggap bahwa Pemerintah sudah mempunyai dana Desa sehingga sifat gotong royong masyarakat Desa Asam Jawa mulai berkurang untuk berpartisipasi karena adanya pemikiran masyarakat yang mengarah sudah adanya Dana Desa untuk menutupin semuanya, sehingga berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Desa untuk membuka pola pikir masyarakat bahwa adanya Dana Desa tidak mencukupi untuk semua pembangunan karna pemerintah sebagai penyelenggara dari pembangunan tersebut harus memusatkan subyek pembangunan berdasarkan kebutuhan oleh masyarakat Desa Asam Jawa.

2) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena dengan pendidikan dapat merubah sikap dan perilaku hidup masyarakat menjadi lebih baik. Namun apabila kita melihat tingkat pendidikan yang ada di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, khususnya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga menjadi kendala bagi pencapaian program pembangunan, karena tingkat pendidikan rendah pola pikir masyarakat sangat terbatas terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, seperti penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan, tata cara pelaksanaan pembangunan partisipatif dan lainnya, daya serap masyarakat sangat lemah sehingga hasil dari penyuluhan tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal.

Meskipun begitu pemerintahan Desa Asam Jawa bersama tokoh masyarakat berupaya agar membuat masyarakat aktif berpartisipasi dalam pembangunan karena faktor pendidikan yang relatif rendah membuat masyarakat tidak begitu peduli dan sulit berpartisipasi untuk itu bagaimana peran pemerintahan Desa Asam Jawa agar dapat memberikan pemahaman yang ekstra untuk membuat masyarakat Desa Asam Jawa serta meningkatkan potensi – potensi yang dimiliki masyarakat agar masyarakat mau berpartisipasi secara sukarela untuk pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai analisis partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Adanya partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi proses pembangunan mulai dari perencanaan, Pelaksanaan, serta pada proses pengawasan atau evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanabtu Selatan dalam kategori baik, hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat serta bentuk partisipasi yang tinggi dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap perencanaan sebelum di laksanakan musrenbang terlebih dahulu diadakan forum musyawarah dusun antara kepala dusun beserta aparat Desa dan tokoh masyarakat. Pada tahap pelaksanaan pembangunan sendiri dalam pembuatan jalan baru melibatkan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dan secara sukarela memberikan lahan mereka untuk pembangunan jalan baru, sedangkan pada tahap pengawasan atau evaluasi hasil dari proses pengawasan maupun evaluasi yang di lakukan terkait pembuatan jalan baru tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Mulai dari tahap perencanaan awalnya sudah melibatkan seluruh masyarakat Desa Asam Jawa, hingga proses pelaksanaannya sesuai dengan besarnya volume yang dii tentukan, material yang di gunakan, hingga proses pengerjaannya tidak menyalahi waktu yang ditentukan.
2. Peran pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui perangkat desa telah melakukan kerja sama yang baik dengan masyarakat. Mereka memperlakukan masyarakat selayaknya rekan kerja dan mereka bermitra dalam merancang dan mengimplementasikan berbagai macam keputusan sehingga dapat

diterima semua pihak meskipun dari pihak pemerintah desa masih kurang untuk merangsang peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pada masyarakat Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Keberhasilan pembangunan yang ada di Desa Asam Jawa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik yang sifatnya pendukung maupun penghambat. Faktor yang menjadi pendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya pembuatan jalan baru yaitu adanya sumbangan dan dukungan serta adanya kemauan / kesadaran dari masyarakat Desa Asam Jawa, salah satu bukti bahwa adanya kesadaran dan bentuk dukungan masyarakat untuk ikut berpartisipasi yaitu kesediaan membebaskan lahannya untuk pembuatan jalan baru. Selain itu faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat desa Asam Jawa dalam pembangunan yaitu karna adanya dana Desa, Adanya dana Desa turut berdampak negatif karna mampu mengurangi sifat gotong royong masyarakat Desa Asam Jawa selama ini yang tertanam baik. Selain itu faktor selanjutnya rendahnya tingkat pendidikan, hal ini menjadi kendala untuk pencapaian program pembangunan, dan pengembangan pola pikir masyarakat yang sangat terbatas terhadap program – program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

B. Saran

Dengan melihat uraian – uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, penulis memberikan alternatif pemecahan berupa saran sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat desa Asam Jawa perlu ditingkatkan lagi dalam pembangunan begitu juga dengan peran pemerintah sebagai pelaksana tugas yang ada di Desa Asam Jawa harus lebih optimal serta melibatkan masyarakat dalam berbagai musyawarah desa, terkhusus untuk musyawarah dusun dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

2. Pemerintah desa perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan dana yang sesuai untuk keperluan pembangunan. Sosialisasi program yang ditekankan pada tujuan dan prinsip-prinsip pembangunan desa harus terus dilakukan secara intensif dan menyentuh seluruh lapisan sehingga dapat diimplementasikan pada berbagai program-program dan kegiatan pembangunan selanjutnya, serta mengembalikan rasa gotong royong masyarakat Desa Asam Jawa.
3. Menjadi sumber pembelajaran dan kajian lebih lanjut bagi penelitian berikutnya yang berkenaan dengan analisis partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Agar dapat menjadi ilmu, pengajaran, dan menjadi referensi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia Theresia, Krisnha dkk, (2015) *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung : Alfabeta
- Aritonang, Bolus,(2018), Skripsi “*Faktor Pendorong dan Penghambat Pertanian kopi Di Desa Aekraja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara*” Medan : Universitas Sumatera Utara
- Arikunto, Suharsimi, (2019). *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan* , Jakarta : Bumi Aksara.
- Azhari Akmal Tarigan, (2016) “*Tafsir Ayat –Ayat Ekonomi*”, Medan : Febi UIN – SU Press
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, (2009), “*Metodologi Penelitian*”, Cetakan 10, Bumi Aksara, Jakarta
- Efriadi, (2010), Skripsi “*Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)*” Medan : Universitas Sumatera Utara
- Fikri Eka D Muhammad, (2018), Skripsi “*Peran Aparatur Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Deskriptif di Desa Sabandar Kabupaten Cianjur)*” Bandung : Universitas Pasundan Bandung
- Harahap, Isnaini, *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. Medan. 2018.
- Intan P. N. Damanik dan M. E. Tahitu, (2007) “*Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Kasus: Masyarakat Desa Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah)*”. *Jurnal Agroforestri*. Vol. II No 1
- Imsar. Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Kopi Gayo (Arbika) Kabupaten Bener Meriah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018. <<https://scholar.google.com>>

- Iqbal, Hasan, (2004) *“Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara : Jakarta
- J Moleong Lexy, (2017), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Josep, (2018), *Tata Pemerintah Antara Good Governance dan Sound Governance*, Jakarta : Indocamp
- Juliansyah, Noor, (2011), *“Metode Penelitian”*, Jakarta : Kencana
- Karim Masril, (2010), Skripsi, *“Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kaiyasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan”* Ternate : Universitas Tidore
- Kartasasmita. Ginandjar, (1996), *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta : Pt. Pustaka Cidesindo
- Laily, Oktafia Nur, (2018), Skripsi *“Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Pembangunan Tambak Udang Buatan Di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura”*, Surabaya : UIN Sunan Ampel
- Michael P Todaro, & Stephen C. Smith, (2006), *Pembangunan Ekonomi* Jakarta : Erlangga
- Nasution Ismail, (2007), Skripsi, *“Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Yang Dibiayai Oleh Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan 2015 – 2016”* Medan : Universitas Sumatera Utara
- Rahardjo Adisasmita, (2006), *Pembangunan Desa Partisipatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Cetakan Pertama
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi *“Metodologi Penelitian Ekonomi”*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2016
- Rahma, Tri Inda Fadhila. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Pembangunan Financial Technology (Fintech)*, Jurnal At-Tawassuh ; Vol III, No.1, 2018 : 642 – 661, <<https://scholar.google.com>>
- Rochajar dan Ardiantoro, (2011), *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo

- Rochajar dan Ardiantoro, (2011), *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Rukminto Adi Isbandi, (2007), *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Slamet. Y, (1994), *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Sondang P Siagian, (2007), *Administrasi Pembangunan . Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Gunung Agung
- Subandi,(2011), *Ekonomi Pembangunan Bandung*: Alfabeta
- Supriatna Tjahja,(2000) *Prinsip – Prinsip Pembangunan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Suryabrata Sumadi,(1998), “*Metode Penilitia*” Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Theresia Aprilia, (2014), *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung : Alfabeta
- “Tafsir AL-Mukhtashar/ markaz tafsir riyadh”, [https : // tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat-59.html](https://tafsirweb.com/1591-quran-surat-an-nisa-ayat-59.html), diakses pada tanggal 19 juni 2020
- Thomas, (2013), *Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, *Jurnal Pemerintahan Integratif*
- Tjokroamidjojo Bintoro, (1995) *Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES*, Cet. Ke-3 Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Usman Sunyoto,(2003), *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat (4) huruf (d)
- Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (41)
- Undang - Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 68 Ayat 2e

Wasistio Sadu, (2012), *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Wahyuddin, (2018), Skripsi, “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa” Makasar : Universitas Islam Negeri ALAUDDIN Makasar.

Zubaedi, (2016), *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* , Yogyakarta : Kencana

Website :

<http://diklat.semarangkota.go.id/post/partisipasi-masyarakat-dalam>. Diunduh pada tanggal 10 Februari 2020

<http://www.bps.go.id/Badan-Pusat-Statisti.Labuhanbatu-Selatan-Dalam-Angka2016-2020> . Diunduh pada tanggal 5 Mei 2020

<http://www.pelajaran.co.id/2017/03/pengertian-masyarakat-menurut-definisi-para-ahli-terlengkap.html>. Diunduh pada tanggal 12 februari 2020

<https://pembangunan-ir-eny-karnawati-msi>. Diunduh pada tanggal 10 Februari 2020